



REPUBLIK INDONESIA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

Jakarta, Maret 2020



KERANGKA PAPARAN RPJMN 2020-2024



1 HIGHLIGHT RPJMN 2020-2024

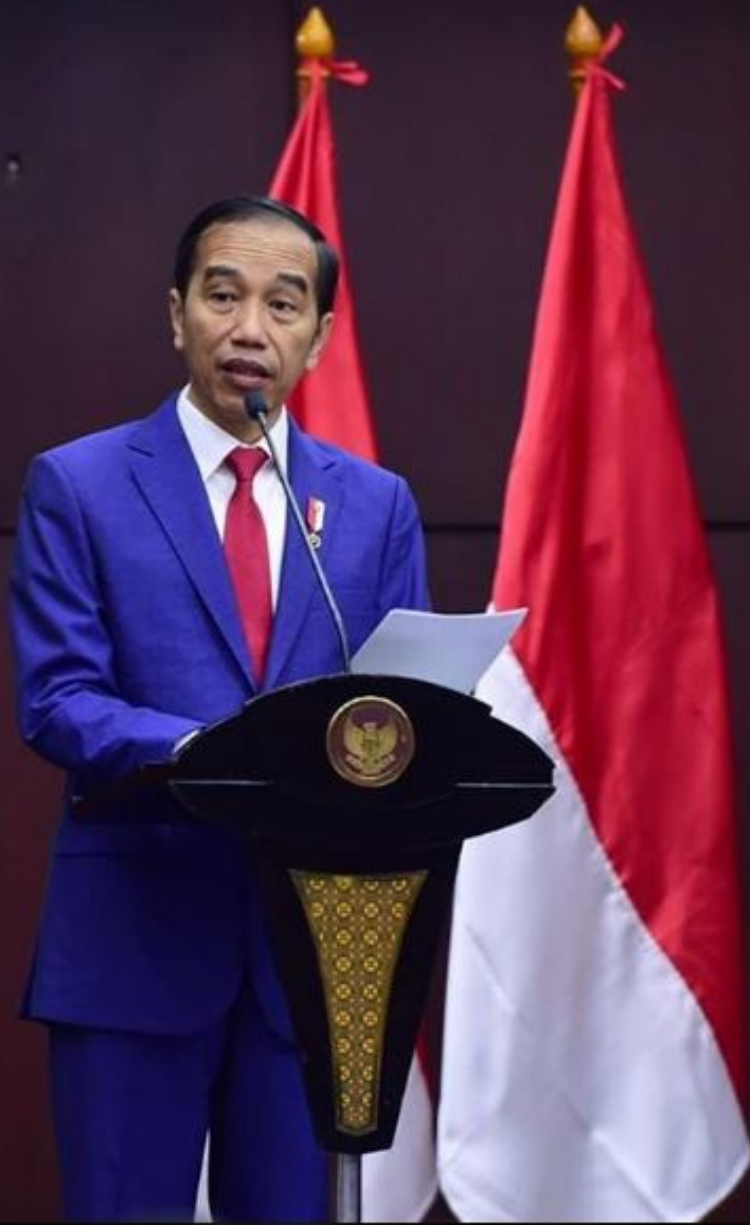
2 SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN 2020-2024

3 PEMBANGUNAN WILAYAH RPJMN 2020-2024

**4 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS NASIONAL
RPJMN 2020-2024**



HIGHLIGHT RPJMN 2020-2024

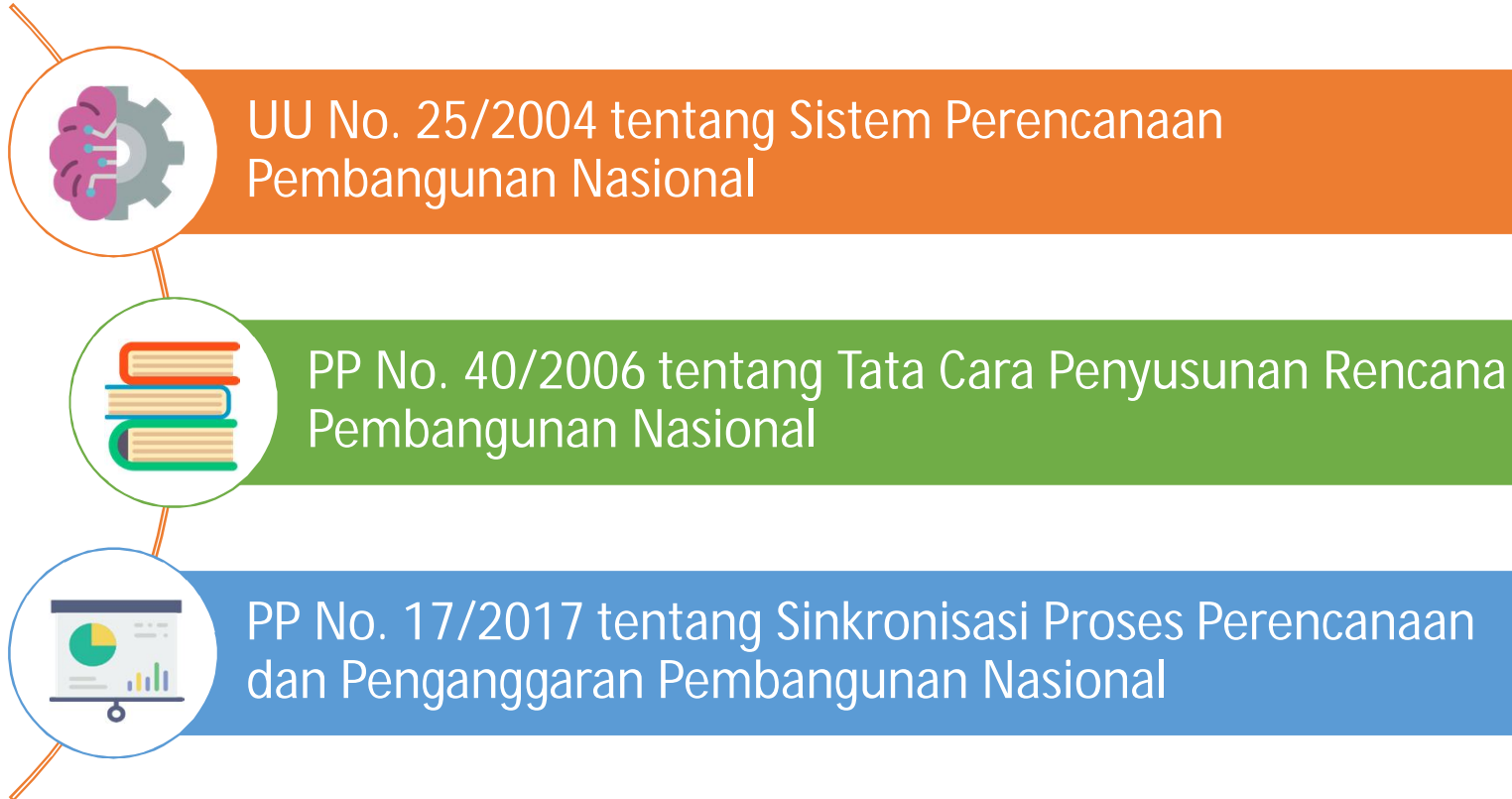


- RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju
- RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan
- Tidak ada visi misi Menteri dan semua mengacu pada RPJMN sebagai penguatan visi misi Presiden dan Wakil Presiden
- Semua rancangan perencanaan betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian
- Sinergi antara lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga ada kesamaan gerak langkah

Arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024



DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024





PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024





DOKUMEN RPJMN 2020-2024 TERDIRI DARI:



I. NARASI

Berisi Kerangka Ekonomi Makro (KEM), target-target utama pembangunan, dan 7 agenda pembangunan yang telah diintegrasikan dengan Visi-Misi dan Arah-an Presiden



II. PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (Major Projects)

Berisi deskripsi/rincian 41 proyek prioritas strategis (*major project*)



III. Matriks PEMBANGUNAN

Berisi matriks agenda pembangunan dan matriks Kementerian/Lembaga (indikatif; non operasional)



IV. ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH

Berisi arah pembangunan 7 wilayah (pulau besar): Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa-Bali



PERPRES NO 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024



Terdiri atas 4 Buku/Lampiran:

1. Narasi RPJMN 2020 – 2024
2. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024
3. Matriks Pembangunan
4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

- Matriks Pembangunan
- Matriks K/L (Non Operasional):
 1. Pagu per Program
 2. Pagu Kegiatan Prioritas



RPJMN 2020-2024 berfungsi sebagai



pedoman bagi
Kementerian/
Lembaga (K/L)
dalam menyusun
Rencana
Strategis
(Renstra) K/L

1



bahan
penyusunan dan
penyesuaian
RPJM Daerah

2



pedoman
Pemerintah
dalam menyusun
Rencana Kerja
Pemerintah
(RKP)

3



acuan dasar
dalam
pemantauan
dan evaluasi

4



acuan bagi
masyarakat
berpartisipasi
dalam
pelaksanaan
pembangunan
nasional

5



DASAR-DASAR KEBIJAKAN RPJMN



RPJMN IV (2020-2024):

Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**

MENERUSKAN JALAN PERUBAHAN UNTUK INDONESIA MAJU:

BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

VISI MISI

Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin



- 1 | Pembangunan SDM
- 2 | Pembangunan Infrastruktur
- 3 | Penyederhanaan Regulasi
- 4 | Penyederhanaan Birokrasi
- 5 | Transformasi Ekonomi

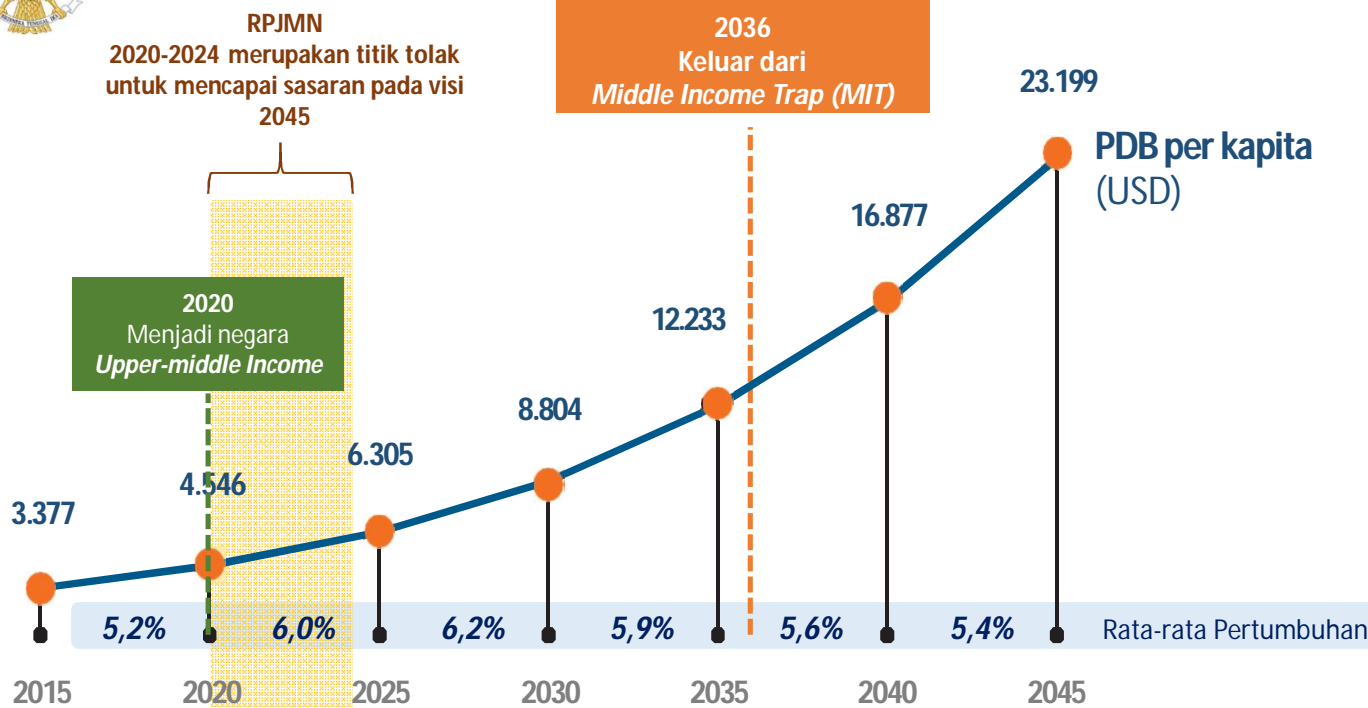


"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen"

Pidato Presiden 20 Oktober 2019

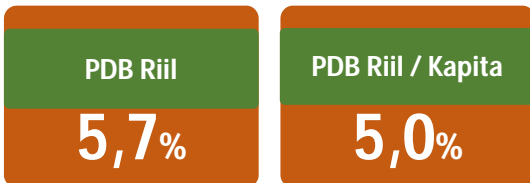


INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU



TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju

Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:



Tahun 2045:



Mendorong Industri Pengolahan

	2018	2024
1 Meningkatkan kontribusi industri pengolahan	19,9%	21,0%
2 Meningkatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas	17,6%	18,9%
3 Meningkatkan kontribusi tenaga kerja di sektor industri	14,9%	15,7%

Mendorong Sektor Pariwisata

	2018	2024
Devisa Pariwisata (Dlm Miliar USD)	19,3	30,0

Mendorong Ekonomi Kreatif

	2018	2024
Nilai tambah ekonomi kreatif (Dlm Triliun Rupiah)	1.105	1846
Nilai transaksi e-commerce (Dlm Triliun Rupiah)	170	600



Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari **Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi** diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



VISI-MISI PRESIDEN

1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN

1	Pembangunan SDM
2	Pembangunan Infrastruktur
3	Penyederhanaan Regulasi
4	Penyederhanaan Birokrasi
5	Transformasi Ekonomi

7 AGENDA PEMBANGUNAN

	1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
	3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



KERANGKA PIKIR 7 AGENDA PEMBANGUNAN

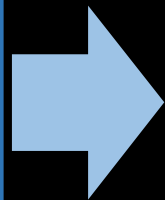
Didukung oleh:

3 **SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

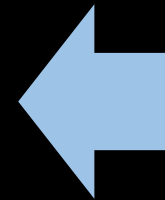
5 **Pembangunan Infrastruktur**



1 **Transformasi ekonomi:**
Rata-rata Pertumbuhan
6% per tahun



2 **Wilayah sebagai Basis
Pembangunan**



6 **Lingkungan Hidup dan
Kerentanan Bencana**



7 **Kondisi Polhukhankam yang kondusif:**

- **Penyederhanaan regulasi**
- **Penyederhanaan birokrasi**
- **Stabilitas politik dan pertahanan keamanan**



AGENDA PEMBANGUNAN 1





AGENDA PEMBANGUNAN 2



Kegiatan Prioritas

1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
4. Pemenuhan Pelayanan Dasar
5. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi
6. Kelembagaan dan Keuangan Daerah



AGENDA PEMBANGUNAN 3





AGENDA PEMBANGUNAN 4





AGENDA PEMBANGUNAN 5





AGENDA PEMBANGUNAN 6





AGENDA PEMBANGUNAN 7





SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024



CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019

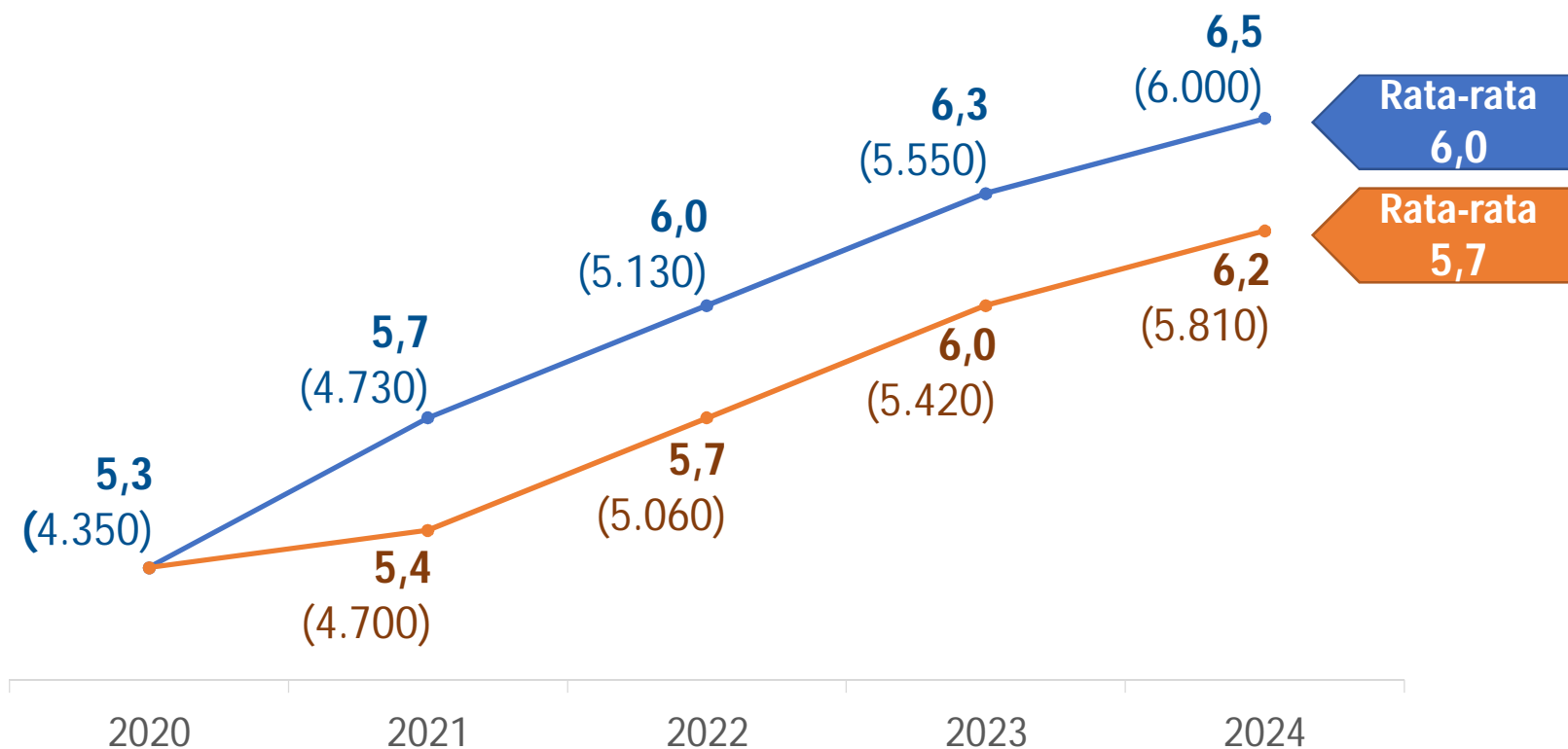


Catatan: Angka pertumbuhan ekonomi dan investasi 2019 berdasarkan perkiraan Bappenas.

Sumber: BPS



PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2020-2024 (%)





SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024: PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS



Tingkat Kemiskinan
(persen)

6,0 – 7,0

Mar 2019: 9,41



Pertumbuhan Ekonomi
(persen)

5,7-6,0

2015-2018: 5,0



Rasio Gini
(indeks)

0,360 – 0,374

Mar 2019: 0,382



Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (persen)

3,6 – 4,3

Agt 2019: 5,28



Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) (nilai)

75,54

2018: 71,39



Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) menuju target 29% di 2030
(Paris Agreement)

27,3%

2018: 22,5%

Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi.

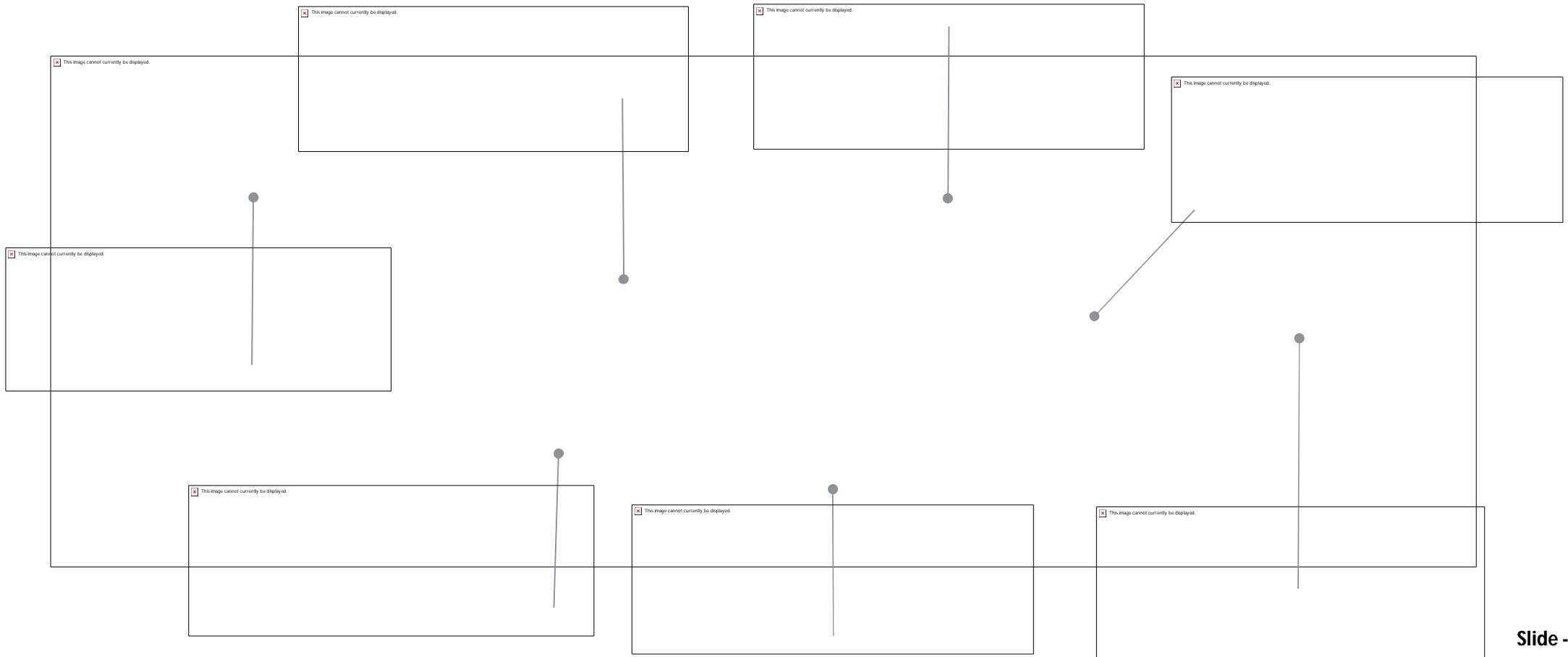


PEMBANGUNAN WILAYAH DALAM RPJMN 2020-2024



ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH RPJMN 2020-2024

Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi dengan memperhitungkan (1) **keberlanjutan daya dukung pembangunan**; (2) **pengembangan ekonomi wilayah** melalui pengembangan komoditas dan hilirisasi; (3) **pembangunan sumber daya manusia** melalui pemenuhan layanan dasar serta peningkatan produktivitas dan daya saing; (4) pengembangan pelaksanaan **desentralisasi dan otonomi khusus**; serta (5) pengembangan **infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial**





PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*) DALAM RPJMN 2020-2024





PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*) dalam RPJMN 2020-2024

Terdapat 41 *Major Project* yang direncanakan dalam RPJMN 2020-2024, yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas.

Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Masyarakat/Badan Usaha.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya.

 Dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti: Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya.

 Diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.



PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DALAM PRIORITAS NASIONAL (1/2)



PN 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai
2. 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter
3. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
4. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
5. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit
6. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
7. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Beraraf Internasional



PN 2

Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

1. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan
2. Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar
3. Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
4. Ibu Kota Negara (IKN)
5. Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)
6. Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke
7. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay



PN 3

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
2. Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)
3. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
4. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh



PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DALAM PRIORITAS NASIONAL (2/2)



PN 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

1. Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
2. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
3. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
4. Kereta Api Makassar-Pare Pare
5. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
6. 18 Waduk Multiguna
7. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
8. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
9. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)
10. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar
11. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
12. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
13. Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis
14. Jembatan Udara 37 Rute di Papua
15. Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
16. Jalan Trans Papua Merauke - Sorong
17. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
18. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
19. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)



PN 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

1. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3



PN 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

1. Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna



CONTOH PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*) DALAM RPJMN 2020-2024

1. Berbasis wilayah
2. Berbasis sektor

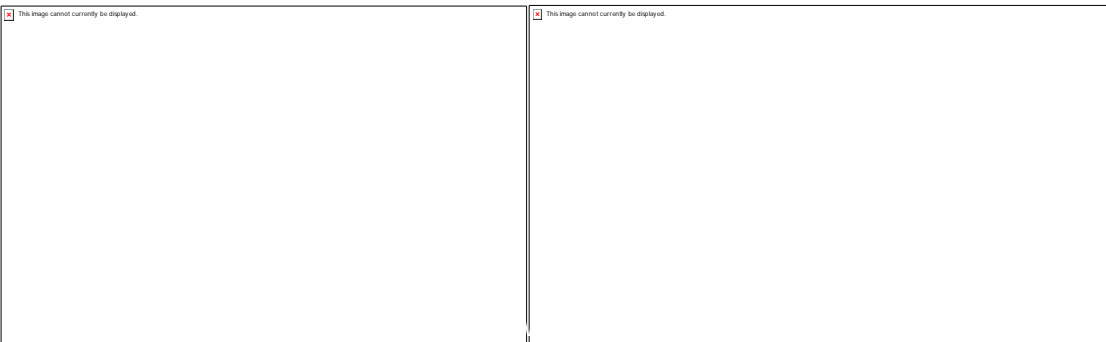


Contoh Proyek Prioritas Strategis Nasional

KAWASAN INDUSTRI SURYA BORNEO INDUSTRI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT



Dasar Hukum : UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri



Total Nilai Investasi 5 tahun

USD 10 Miliar

- Izin lokasi **147 Ha**
- **Rencana Bisnis Kedepan :**
 PT. Citra Borneo Utama → Refinery, Kernel Crushing, Moduling, Filling, Margarine & Shortening Plant
 PT. Citra Borneo Energy → Biodiesel, Gliceryn, Methil Ester Plant
 PT. Citra Borneo Chemical → Fatty Acid, Fatty Alcohol Plant

Dukungan yang sudah dilaksanakan:

Fasilitasi	Instansi
Izin Prinsip 6/62/IP-PB/PMDN/2017, 6 September 2017	BKPM
Nomor Induk Berusaha 8120000881389 18 Agustus 2018	Lembaga Penyelenggara OSS
Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No : 0614/15.02/KPTP/PB/XII/2016	Kementerian Perdagangan

Sumber data: PT. SBI, Bappenas, Kementerian Perindustrian 2019

Lini Produksi

Saat ini :

CPKO, RBDPO, Stearin, Olein, PFAD, Minyak Kemasan, margarine

Kedepan :

Biodiesel, Metil Ester, Pupuk, Oleokimia, Gliserin, Fatty Acid, Fatty Alcohol

Kebutuhan Selanjutnya

Fasilitasi	Instansi
○ Peningkatan Status Jalan Kabupaten menjadi Jalan Nasional	Kementerian PUPR
○ Fasilitasi untuk Pengerukan Sungai Kumai untuk mengurangi sedimentasi	Kementerian PUPR
○ Peningkatan Kapasitas dan Perpanjangan Runway Bandara	Kementerian Perhubungan
○ Peningkatan Lab Uji BPOM di Wilayah Kotawaringin Barat	BPOM
○ Karantina Benih Sawit	Kementerian Pertanian
○ Vokasi sekelas Universitas dan Politeknik di Kalimantan fokus Agro Industri dan Kimia/Teknik Kimia	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dukungan SDM Industri

- **SMK dengan bidang keahlian** Agribisnis dan Agroteknologi : 9
Teknologi dan Rekayasa : 4
- **Politeknik**
11 Politeknik → Teknologi Hasil Pertanian
- **BLK**
Kotawaringin Barat → 11 Kejuruan
Kotawaringin Timur → 9 Kejuruan
Seruyan → 5 Kejuruan

Indikasi Proyek Dukungan Daerah

- Peninjauan RTRW dan penyusunan RDTR
- Fasilitasi penggunaan air baku untuk kepentingan umum antara pengelola kepada Pemerintah Provinsi



Contoh Proyek Prioritas Strategis Nasional:

Percepatan Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi (1/2)



Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI terkait Gizi

Mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak:

- Jaminan asupan gizi sejak kandungan
- Memperbaiki pola asuh keluarga
- Memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi

	Baseline	Target
Prevalensi <i>Stunting</i> pada Balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14 (2024)
Prevalensi <i>Wasting</i> (kurus) pada Balita (%)	10,2 (Riskesdas, 2018)	7 (2024)

Penyebab **stunting bersifat multidimensional**, perlu upaya **lintas sektor** melibatkan seluruh **stakeholder** secara **terintegrasi** dari **pusat, daerah**, hingga tingkat **desa**

Pendekatan Multi-sektor



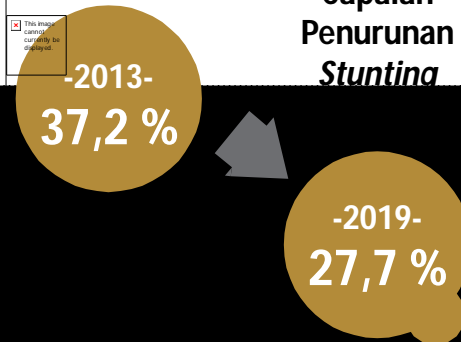
Lokasi Fokus

2019	2020	2021	2022	2023	2024
160 kab/kota	260 kab/kota	360 kab/kota	460 kab/kota	514 kab/kota	514 kab/kota



Contoh Proyek Prioritas Strategis Nasional:

Percepatan Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi (2/2)



Program Terpadu

Kegiatan	Instansi
○ Pemberian makanan dan nutrisi tambahan	Kementerian Kesehatan

Total Investasi Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*: Rp 159,1 Triliun

Target

- AKI 183/100.000 KH
- Prevalensi *stunting* balita turun menjadi 14,0%



TERIMA KASIH





TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMN BERDASARKAN PP NO.40/2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional



Rancangan Teknokratik RPJMN	Rancangan Awal RPJMN	Rancangan RPJMN	Musrenbangnas RPJMN	Rancangan Akhir RPJMN
<ul style="list-style-type: none">Disusun melalui mekanisme:<i>Breakfast Meeting</i> internal BappenasStakeholder:<ul style="list-style-type: none">- Akademisi- Tim Ahli <p>Berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">KEMRencana Pembangunan (sektoral dan wilayah) berdasarkan evaluasi dan aspirasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Memuat:<ol style="list-style-type: none">RPJPRT RPJMNVisi, Misi, Program Prioritas PresidenBerisi:<ol style="list-style-type: none">Strategi pembangunan nasionalKebijakan umumProgram prioritas PresidenKEM	<ul style="list-style-type: none">Memuat hasil Sidang Kabinet RPJMNMemuat masukan Rancangan Renstra dan Rancangan Awal RPJMNPenelaahan Renstra	<ul style="list-style-type: none">Dilakukan maksimal 2 bulan setelah Pelantikan Presiden (pelantikan Presiden 20 Okt 2019) → Desember 2019Forum sebelum Musrenbang:Konsultasi PublikSosialisasi Rancangan Awal RPJMNPenjaringan Aspirasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Berisi: Rancangan RPJMN dan hasil MusrenbangnasDisampaikan kepada PresidenDitetapkan maksimal 3 bulan setelah Pelantikan Presiden (bulan Januari 2020) melalui Perpres
Disampaikan Kepada Presiden Terpilih	Disampaikan pada Sidkab pedoman penyusunan Rancangan Renstra	Bahan Musrenbangnas RPJMN		Disampaikan Kepada Presiden



ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH (7 PULAU BESAR) DALAM RPJMN 2020-2024



PULAU PAPUA

Target Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	6,6
Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024)	2,1
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	41,1
Tingkat Kemiskinan (%)	18,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5

This image cannot currently be displayed.

Arah Kebijakan Pembangunan:

- Percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya melalui transformasi ekonomi dari berbasis SDA ke industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata, hilirisasi industri pertambangan, minyak, dan gas bumi.
- Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat.
- Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.



KEPULAUAN MALUKU

Target Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	7,3
Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024)	0,6
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	18,8
Tingkat Kemiskinan (%)	9,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,6

This image cannot currently be displayed.

Arah Kebijakan Pembangunan:

- Optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau.
- Mendorong transformasi ekonomi menjadi lebih maju dan bernilai tambah tinggi melalui :
 - ✓ percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan)
 - ✓ pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan hasil nikel , tembaga, dan gas
 - ✓ pengembangan pariwisata



KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Target Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	6,0
Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024)	1,5
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	19,9
Tingkat Kemiskinan (%)	12,1
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,1

This image cannot currently be displayed.

Arah Kebijakan Pembangunan:

- Optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau.
- Mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui :
 - ✓ pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE);
 - ✓ industri kreatif berbasis budaya,
 - ✓ percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan); peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan pengembangan industri mangan dan tembaga.



PULAU SULAWESI

Target Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	7,6
Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024)	7,0
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	110,7
Tingkat Kemiskinan (%)	7,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5

Arah Kebijakan Pembangunan:

- Memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; Pengembangan industri berbasis logistik; Pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; serta Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi.
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.
- Mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang.
- Mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana.



PULAU KALIMANTAN

Target Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	6,7
Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024)	8,8
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	143,1
Tingkat Kemiskinan (%)	3,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,4

This image cannot currently be displayed.

Arah Kebijakan Pembangunan:

- Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo)
- Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi;
- Mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
- Mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan;
- Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
- Pemandangan Ibu Kota Negara (IKN) untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional; peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.



PULAU SUMATERA

Target Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	6,0
Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024)	20,9
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	251,1
Tingkat Kemiskinan (%)	7,1
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6

This image cannot currently be displayed.

Arah Kebijakan Pembangunan:

- Memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global melalui kerjasama internasional, seperti: Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan masyarakat ekonomi ASEAN
- Menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional.
- Mempercepat transformasi ekonomi melalui:
 - ✓ hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah
 - ✓ mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan.
 - ✓ pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor (hub internasional di Kuala Tanjung).



PULAU JAWA-BALI

Target Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	5,9
Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024)	59,2
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	742,4
Tingkat Kemiskinan (%)	6,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,1

This image cannot currently be displayed.

Arah Kebijakan Pembangunan:

- Memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor
- Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE.
- Meningkatkan peran swasta dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin tercapainya iklim investasi yang terbuka dan efisien.
- Kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.



Contoh Pembangunan Wilayah Terintegrasi KAWASAN INDUSTRI TELUK BINTUNI



Kab. Teluk
Bintuni, Papua
Barat



Skema KPBU dengan
Kementerian Perindustrian
sebagai PJK (Penanggung
Jawab Proyek Kerjasama)

10 Perusahaan
sudah menyampaikan *Letter
of Interest*

Dasar Hukum: UU No. 3/2014 tentang Perindustrian | PP No.
142/2015 tentang Kawasan Industri



KI Teluk Bintuni

- Kegiatan utama: industri pengolahan petrokimia
- Total lahan Tahap I seluas 50 Ha (dari rencana total 200 ha)
- Total investasi kawasan Tahap I yang dibutuhkan sebesar Rp. 1,7 triliun untuk *Capex* dan Rp. 895 miliar untuk pengeluaran operasional (*Opex*)
- Total investasi Pabrik Metanol sebagai *anchor industry* sebesar Rp. 9,6 triliun untuk pengeluaran modal (*capex*), Rp. 415 miliar untuk biaya operasional, dan Rp. 1,7 triliun untuk bahan baku
- Diperkirakan mampu menyerap 1.000 tenaga kerja saat konstruksi dan 500 orang pada saat beroperasi*

Dukungan Lintas Sektor:

- Penyusunan *Outline Business Case* (OBC) Teluk Bintuni oleh Kementerian PPN/Bappenas
- Dalam proses persetujuan *Project Development Facility* oleh Kementerian Keuangan
- Kementerian ESDM memberikan persetujuan alokasi pasokan gas dari BP Tangguh dengan harga gas masih dalam proses negosiasi
- Pengadaan lahan Tahap I 50 Ha oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
- Kementerian Perindustrian melaksanakan *Market Sounding* dan indikatif alokasi anggaran untuk pembayaran *Availability Payment* (AP)

Timeline Proyek KPBU KI Teluk Bintuni

OBC dan PDF	: 2018 - 2020
Pembebasan Lahan	: 2020
Tahap Transaksi	: 2020
Tahap Konstruksi	: 2021-2022
Operasional:	2023-2024

*Kementerian Perindustrian



Contoh Pembangunan Wilayah Terintegrasi KAWASAN INDUSTRI TELUK WEDA, HALMAHERA



Dasar Hukum : UU No. 3/2014 tentang Perindustrian
PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri



Total Nilai Investasi

USD 7 Miliar

- Total **9 Tenant Perusahaan** dan **1 Perusahaan Pengelola**
- **Rencana Produksi** : Ni + Co Hydroxide, Baterai EV, Ferro, Nickel (28 RKEFs), Ferro Chrome, Stainless Steel

□ Dukungan yang sudah dilaksanakan:

Fasilitas	Instansi
✓ Rekomendasi Izin Prinsip Kawasan Industri 08/PPI/R-KI/05/2018 Tgl 25 Mei 2018	Kementerian Perindustrian
✓ Izin Prinsip BKPM 1949/1/PI/PMA/2018 Tgl 31 Mei 2018	BKPM
✓ Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120315042745 Tgl 24 Oktober 2018	Lembaga Penyelenggara OSS
✓ AMDAL (Izin Lingkungan) 502/1/DPMPSTSP/I/2019 Tgl.14 Januari 2019	DPMPSTSP Maluku Utara

Sumber data: PT. IWIP, Bappenas, Kementerian Perindustrian 2019

□ Rencana Selanjutnya

Fasilitas	Instansi
○ Peningkatan dan Perbaikan Jalan Ruas (1) Weda-Sagea 034; (2) 012-011-010 Weda-Sofifi; (3) 035 Sagea Patani	Kementerian PUPR
○ Fasilitas hunian terpadu untuk pekerja (Rusunawa)	Kementerian PUPR
○ Fasilitas untuk mendapatkan Surat Izin Penggunaan/Pemanfaatan Air dari Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	Kementerian PUPR
○ Kebutuhan pelabuhan: (1) Izin tersus untuk kawasan; (2) Pelabuhan umum	Kementerian Perhubungan
○ Pemberian izin landasan bandara menjadi 1650m	Kementerian Perhubungan

Dukungan SDM Industri

- **SMK dengan bidang keahlian**
Agribisnis dan Agroteknologi : 16
Energi dan Pertambangan : 5
Teknologi dan Rekayasa : 15
- **Politeknik**
Halmahera → Teknik Pertambangan
- **BLK**
BLK Kab. Halmahera Barat → 6 kejuruan
BLK Kota Ternate → 12 kejuruan

Indikasi Proyek Dukungan Daerah

- Fasilitas kemitraan sentra IKM dengan kawasan industri.
- Pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dan calon tenaga kerja.
- Dukungan bagi operasional Instansi penerbit SKA Ekspor (IPSKA).



Contoh Pembangunan Wilayah Terintegrasi KAWASAN PARIWISATA LOMBOK-MANDALIKA

Kelembagaan

(Kemenparekraf, KemendesPDTT, KLHK, KemenESDM, KemenKUKM, Pemda, BUMN)

1. *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP)
2. Membangun *Sustainable Tourism Observatory* (STO) Lombok
3. Penguatan tata kelola destinasi wisata
4. Pengelolaan Taman Nasional
5. Pengelolaan Geopark

Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi

(KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenkominfo, BUMN, Kemenparekraf, KemenLHK, KemenKes, KemenKUKM, Pemda)

1. Pembangunan jalan bypass Bandara BIL-Mandalika
2. Pembangunan Pengurukan Pengingat
3. **Peningkatan sanitasi dan air bersih**
4. **Penataan kota dan lanskap**
5. **Sarana prasarana kesehatan**
6. **Peningkatan TIK**
7. Pusat Budaya Senggigi
8. Pembangunan Paralayang Point dan Desa Nelayan
9. Revitalisasi Kota Tua Ampenan
10. Revitalisasi Pasar Ikan di Teluk Awang
11. Penyelenggaraan event, termasuk MotoGP
12. DAK Fisik Pariwisata

SDM Pariwisata & Pemberdayaan

Masyarakat (Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, KemenKUKM, Kemenaker, Pemda)

1. Politeknik, BLK dan SMK Pariwisata
2. Pelatihan dan pemagangan vokasi Pariwisata
3. Sertifikasi ketrampilan
4. Gerakan sadar wisata
5. Perintisan pengembangan produk kreatif berbasis lokal
6. Pengembangan desa wisata
7. DAK Non Fisik Pariwisata

Investasi, Industri dan Pemasaran

Pariwisata (BKPM, Kemenparekraf, Kemenkomaritim dan Investasi, BUMN, Pemda)

1. *Branding Pariwisata Lombok*
2. Fasilitasi investasi termasuk ke KEK Mandalika
3. Fasilitasi pemasaran
4. Penerapan standar industri pariwisata
5. Meningkatkan rantai pasok usaha masyarakat ke usaha pariwisata
6. Peningkatan akses permodalan dan pasar

Proyeksi dampak:

- Peningkatan wisatawan mancanegara dari 982,7 ribu orang (2018) → 1,361 juta orang (2023) dan 5,7 juta orang (2045)
- Peningkatan wisatawan nusantara dari 1,3 juta orang (2018) → 1,842 juta orang (2023) dan 6,3 juta orang (2045)
- Peningkatan devisa pariwisata dari USD 257 juta (2018) menjadi USD 522 juta (2023) dan USD 11,3 miliar (2045)
- Penyerapan tenaga kerja dari 143.443 orang (2018) → 242.722 orang (2023) dan 1.271.645 orang (2045)



Contoh Pembangunan Wilayah Terintegrasi KAWASAN PARIWISATA WAKATOBI



Kelembagaan

(Kemenparekraf, KemendesPDTT, KLHK, KemenKUKM, Pemda)

1. *Integrated Tourism Master Plan (ITMP)*
2. Membangun *Sustainable Tourism Observatory (STO)*
3. Penguatan tata kelola destinasi wisata
4. Pengelolaan Taman Nasional
5. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari

Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi

(KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenkominfo, BUMN, Kemenparekraf, KemenLHK, KemenKes, KemenKUKM, Pemda)

1. Pembangunan jalan nasional Bandara Matohara – Pulau Wangi-wangi dan jalan lingkar di 4 pulau inti
2. Peningkatan sanitasi dan air bersih
3. Penataan kota dan lansekap di kawasan perkotaan Wanci, Pulau Wangi-wangi
4. Revitalisasi permukiman budaya dan tradisional
5. Sarana prasarana kesehatan
6. Peningkatan TIK
7. Penyelenggaraan event
8. DAK Fisik Pariwisata

SDM Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, KemenKUKM, Kemenaker, BNPB, Pemda)

1. Politeknik, BLK dan SMK Pariwisata
2. Pelatihan dan pemagangan vokasi Pariwisata
3. Sertifikasi ketrampilan
4. Gerakan sadar wisata
5. Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana
6. Perintisan pengembangan produk kreatif berbasis lokal
7. Pengembangan desa wisata
8. DAK Non Fisik Pariwisata

Investasi, Industri dan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(BKPM, Kemenparekraf, Kemenkomaritim dan Investasi, BUMN, Pemda)

1. *Branding Pariwisata Wakatobi*
2. Fasilitasi pemasaran
3. Penerapan standar industri pariwisata
4. Meningkatkan rantai pasok usaha masyarakat ke usaha pariwisata
5. Peningkatan akses permodalan dan pasar

**Penghitungan proyeksi dan manfaat pembangunan DPP Wakatobi menjadi bagian dari penyusunan ITMP Wakatobi pada tahun 2020*



Contoh Pembangunan Wilayah Terintegrasi KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI



Kab. Simalungun,
Sumatera Utara



Pengelola PT. Kawasan
Industri Nusantara (KINRA),
anak perusahaan PTPN III

Diresmikan: 2012;
Beroperasi: 2015

- Kegiatan utama: industri pengolahan kelapa sawit dan karet
- Total lahan terpakai per 2019: 247 ha (12,57%) dari total rencana 1.933,8 ha**
- Total investasi *tenant* per 2019: Rp. 7.543,89 Miliar (Unilever, PT Industri Nabati Lestari, PT Alternative Protein Indonesia, PT All Cosmos Biotek, PT Aice Sumatera Industry)**
- Serapan tenaga kerja per 2019: 1.167 orang**

Dukungan:

- Pelaksanaan Perpres No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
- Fasilitasi investasi
- Penyediaan SDM terampil:
 - BLK: Kab. Batubara (7 kejuruan), Pematang Siantar (12 kejuruan), Simalungun (7 kejuruan), Kota Tebing Tinggi (4 kejuruan),
 - SMK dengan bidang keahlian: Teknologi dan Rekayasa (23 sekolah), Agribisnis dan Agroteknologi (11 sekolah)
 - Badan Diklat Industri Medan: pengolahan perkebunan sawit

Dasar Hukum: UU No. 3/2014 tentang Perindustrian | PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri

This image cannot currently be displayed.

KETERANGAN

- Tol Medan – Tg Morawa
- Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
- Rencana Tol Kuala Tanjung - Parapat
- Rencana Tol Tebing Tinggi – Kisaran
- Jalur Kereta Api

KEK Sei Mangkei

- Infrastruktur pendukung di luar kawasan yang telah dibangun (67,17%)*: jalur KA, Bandara Internasional Kualanamu, Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, dan Pelabuhan Kuala Tanjung
- Pusat Inovasi

* Survei Bappenas, 2019 ** PTPN III, 2019



Contoh Pembangunan Wilayah Terintegrasi

KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN

Kelembagaan

(Kemenparekraf, Kemendikbud, KemendesPDTT, KLHK, KemenESDM, KemenKUKM, Pemda, BUMN)

1. *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP)
2. Membangun *Sustainable Tourism Observatory* (STO)
3. Penguatan tata kelola destinasi wisata
4. Pengelolaan kawasan Badan Otorita Borobudur
5. Pengelolaan Taman Nasional
6. Pengelolaan Geopark

Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi

(KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenkominfo, BUMN, Kemenparekraf, KemenLHK, KemenKes, KemenKUKM, Pemda)

1. Pembangunan jalan Borobudur-NYIA
2. Revitalisasi Jl. Mangkubumi
3. Dukungan pengembangan parkir, penyediaan air, pengelolaan limbah, dan jalur pedestrian *Cableway* Menoreh
4. **Peningkatan sanitasi dan air bersih**
5. **Penataan kota dan lanskap**
6. **Sarana prasarana kesehatan**
7. **Peningkatan TIK**
8. Revitalisasi Kota Yogyakarta
9. **Penyelenggaraan event**
10. DAK Fisik Pariwisata

SDM Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat

(Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, KemenKUKM, Kemenaker, Pemda)

1. Politeknik dan SMK Pariwisata
2. Pelatihan dan pemagangan vokasi Pariwisata
3. Sertifikasi ketrampilan
4. Gerakan sadar wisata
5. Meningkatkan kualitas produk dan jasa pariwisata berbasis masyarakat
6. Pengembangan desa wisata
7. DAK Non Fisik Pariwisata

Investasi, Industri dan Pemasaran Pariwisata

(BKPM, Kemenparekraf, Kemenkomaritim dan Investasi, BUMN, Pemda)

1. *Branding* BYP
2. Fasilitasi investasi
3. Fasilitasi pemasaran
4. Penerapan standar industri pariwisata
5. Meningkatkan rantai pasok usaha masyarakat ke usaha pariwisata
6. Peningkatan akses permodalan dan pasar

Proyeksi dampak:

- Peningkatan wisatawan mancanegara dari 398 ribu orang (2018) → 602 ribu orang (2023) dan 1,8 juta orang (2045)
- Peningkatan wisatawan nusantara dari 9,0 juta orang (2018) → 10,8 juta orang (2023) dan 23,4 juta orang (2045)
- Peningkatan devisa pariwisata dari USD 262 juta (2018) menjadi USD 544 juta (2023) dan USD 2,7 miliar (2045)
- Penyerapan tenaga kerja dari 85.629 orang (2018) → 121.588 orang (2023) dan 398.581 orang (2045)

Rincian Proyek Prioritas Strategis *(Major Project)*



1. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi



Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kontribusi PDB industri menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% lebih rendah dari pertumbuhan nasional. • Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju yang lebih lambat dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara lain • Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah. • Potensi pemanfaatan teknologi digital sangat besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri berbasis konten. 					
Manfaat	Meningkatnya pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 8,1 persen Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam PDB menjadi 21,0 persen Meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan menjadi USD 183,4 miliar			Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi menjadi 13 persen Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) \geq 3.0 menjadi 60 perusahaan (kumulatif)		
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,7% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,0%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,8% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 6,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20,4% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 7,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 21% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 8,1%	Rp 245,8 T • APBN: Rp 13 T • Swasta: Rp 106,9 T • BUMN: Rp 125,9 T
Pelaksana	Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkominfo, Kemenristek, Kemenparekraf, KemenKUKM, KemenKP, Kemendag, KPPU, KemenLHK, K/L lainnya (Sesuai Making Indonesia 4.0: KemenPUPR, KemenESDM, Kementan, Bappenas, BKPM, Kemenaker dan Kemendagri), Pemda, Dunia Usaha					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan (Kemenperin, Kemendag, KPPU, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas) 2. Perbaikan alur aliran material dan penerapan standar keberlanjutan (Kemenperin, KemenKP, Kemendag, KemenKP, KemenLHK, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu) 3. Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi (Kemenristek, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenparekraf, KemenKP, KemenLHK, KemenKUKM, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu) 4. Peningkatan investasi (BKPM, Kemenperin, Kemenko Perekonomian) 5. Pemberdayaan UMKM (Kemenperin, KemenKUKM, Kemenparekraf) 					



2. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai



Latar Belakang	Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritaslainnya						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024) 2. Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) 3. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024) 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres ITMP untuk Borobudur dskt, Danau Toba dskt, dan Lombok (100%) • Penyusunan ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Wakatobi, Bangka Belitung dan Morotai • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, BTS, Wakatobi, Morotai, Bangka Belitung (100%) • Penyusunan ITMP untuk Raja Ampat • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo, dan Manado-Likupang (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (20%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres ITMP untuk Raja Ampat (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (40%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (20%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (80%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (60%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Kawasan Prioritas Selesai 100% 	Rp 161 T (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)
Pelaksana	Kemenparekraf, KemenPUPR, Kemenhub, KemenLHK, KemenKP, KemendesPDTT, KemenKUKM, KemenESDM, Kemenaker, BKPM, BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, KemenATR/BPN, Kementan, KemenBUMN, Kemendag, Bappenas, Pemda, Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata, BUMN, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perintisan Destinasi Pariwisata (Kemenparekraf, KemenATR/BPN, BKPM) 2. Penanganan Jalan Mendukung 10 DPP (KemenPUPR, Pemda) 3. Pembangunan Pelabuhan dan Bandara (Kemenhub, BUMN) 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BUMDes (Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, Kemenaker, KemenKUKM) 5. Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (KemenPUPR, KemenESDM, Kemenkes, BNPB, Pemda) 6. Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan (Kemenparekraf, Kementan, KemenKP, KemenLHK, BUMN, Badan Otorita, Kemendag) 				



3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kontribusi PDB industri cenderung menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% atau lebih rendah dari pertumbuhan nasional. • Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah. • Sekitar 71 persen impor Indonesia adalah bahan baku and produk antara untuk industri. • Kapasitas industri domestik yang tidak mampu memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan oleh Global Value Chain. • Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama periode 2015-2019 di luar Pulau Jawa membuka akses pusat-pusat produksi yang selama ini belum terkoneksi 						
Manfaat	Mendorong hilirisasi industri berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa.						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	KI beroperasi : 3 Smelter beroperasi: 4 smelter (kumulatif)	KI beroperasi : 4 (kumulatif) Smelter beroperasi: 30 smelter (kumulatif)	KI beroperasi : 5 (kumulatif) Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif)	KI beroperasi : 7 (kumulatif) Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif)	KI beroperasi : 9 (kumulatif) Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif)	KI beroperasi : 9 KI Smelter beroperasi : 31 smelter (kumulatif)	Rp 317,4 T <ul style="list-style-type: none"> • APBN: Rp 15,7 T • Swasta: Rp 176,0 T • KPBU: Rp 14,3 T • BUMN: Rp 111,4 T
Pelaksana	Kemenperin, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, KPPU, KemenKUKM, Kemendag, KemenKP, Kementan, Kemenaker, KemenBUMN, Pemda, Swasta						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitasi investasi (Kemenko Perekonomian, Kemenperin, KemenESDM, Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, Kemendag, KPPU) 2. Pembangunan kawasan industri dan smelter (Swasta, Kemenperin, KemenESDM, KemenBUMN, KemenATR/BPN) 3. Pengembangan infrastruktur pendukung (KemenPUPR, Kemenhub, KemenBUMN) 4. Peningkatan investasi, pemasaran dan kerjasama internasional (BKPM, Kemenperin, Kemendag, KemenBUMN) 5. Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM (Kemenperin, KemenKUKM, Kementan, KemenKP, KemenLHK, Kemenaker, KemenBUMN, KPPU) 						



4. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani Dan Nelayan

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terbentuk business model korporasi petani dengan skala ekonomi yang menerapkan konsep society 5.0 • Belum terintegrasinya 1.029 kluster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. • Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23% dan keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi dan pasar. • Rantai pasok komoditas panjang dan biaya logistik mahal: harga beras di tingkat konsumen 2,1-2,7 kali dibandingkan harga petani (jeruk 4 kali lipat). • Pengembangan 1.000 Toko Tani Indonesia sebagai simpul distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian. • Jumlah koperasi nelayan yang aktif sekitar 1.907 unit dengan jumlah nelayan mencapai 2,6 juta jiwa (2016). 					
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs). 2. Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun. 3. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari tergantung pemerintah (APBN dan Subsidi) menjadi mandiri (investasi dan bisnis). 					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan produktivitas komoditas : 5 % Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp49,20 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp. 45,0 juta/nelayan/tahun Terbentuk piloting 5 korporasi petani	Peningkatan produktivitas komoditas : 5 % Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp51,70 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp.50,4 juta/nelayan/tahun Terbentuk 33 Korporasi petani	Peningkatan produktivitas komoditas : 5 % Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp54,30 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp.55,4 juta/nelayan/tahun Terbentuk 65 kluster korporasi petani	Peningkatan produktivitas komoditas : 5 % Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp57,00 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp.61,0 juta/nelayan/tahun Terbentuknya 150 korporasi petani	Peningkatan produktivitas komoditas : 5 % Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp59,80 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp 67,0 juta/nelayan/tahun Terbentuknya 350 korporasi petani		
Pelaksana	Kementan, KemenKP, KemenKUKM, KemenPUPR, Kemenperin, Perguruan Tinggi, dan Swasta					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> dan <i>Precision Farming/</i> Agro Maritim 4.0 2. Penguatan kelembagaan petani 3. Investasi, pembiayaan, asuransi sektor pertanian dan perikanan 			<ol style="list-style-type: none"> 4. Kemitraan KUKM dan wirausaha pertanian dan perikanan 5. Fasilitasi pemasaran 		



5. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer per tahun 2018 baru mencapai 8,55 persen, sementara target yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 23 persen (RUEN). • Indonesia impor minyak mentah tahun 2018: 309.739 barel/hari (26,49% kapasitas Kilang) dan BBM: 395.386 BOPD (kebutuhan Indonesia: 1,3 Juta BOPD) • Perkebunan sawit rakyat 5,8 juta ha (41%), namun hanya menghasilkan 14 juta ton (34%), perkebunan sawit swasta 8,1 juta ha • Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 40 juta ton per tahun, dan minyak sawit merupakan ekspor komoditas andalan Indonesia saat ini. 							
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen; 2. Meningkatnya produktivitas sawit 10 persen per tahun; 3. Meningkatnya produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia; 4. Meningkatnya nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat. 							
Durasi	2020-2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN	
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Green Refinery Standalone kapasitas 20 ribu barrel per day di RUIII Plaju (Tahapan Pembangunan)	Penyusunan BEDP: <i>Basic Engineering Design Project</i> dan tender DFC (<i>Dual Feed Competition</i>)	Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (<i>Final Investment Decision</i>)	EPC	EPC	Mid 2024 <i>Start Up dan On Stream</i>		Rp 32,0 Triliun • APBN: Rp 1,1 Triliun • BUMN: Rp 11,9 Triliun • Swasta: Rp 19 Triliun
	Volume produksi kelapa sawit (Ton CPO)	43,7 juta	44,6 juta	45,5 juta	46,4 juta	50,4 juta		
<i>Green Refinery Standalone</i> kapasitas 20 ribu barrel per day di RUIII Plaju	Perkiraan Capex USD 650-850 Juta = perkiraan Rp 11,9 Triliun (BUMN)							
Pelaksana	KemenESDM, Kementan, Kemendagri, BUMN, Swasta							
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan BBN (KemenESDM) 2. Pembangunan kilang BBN berbahan baku minyak sawit 100% (<i>Green Refinery Standalone</i>) (BUMN) 3. Akselerasi, Replanting, Penerapan GAP, dan Pengolahan Sawit Rakyat (Kementan) 4. Sertifikasi ISPO dan RSPO (Kementan) 5. Pembangunan unit pengolahan minyak sawit industri di perdesaan dekat perkebunan (<i>demetalized palm oil mill</i>) (Swasta) 							



6. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menjadi salah satu negara produsen utama Udang dunia Pemanfaatan lahan budidaya air payau baru sekitar 715.000 hektar (24%) dari potensi lahan yang mencapai yang seluas 2,9 juta hektar. Luas lahan yang dimanfaatkan, sebesar 60 % merupakan tambak tradisional. 					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya menjadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5 persen per tahun. Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8 persen per tahun 					
Durasi dan Lokasi	2020-2024 (5 tahun) : Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB					
	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
Indikasi Target dan Pendanaan	2020	2021	2022	2023	2024	Rp 25 Triliun <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 3,3 Triliun KPBU dan Swasta: Rp 21,7 Triliun
	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 7,45 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 7 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 7,92 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 8 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 8,69 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 10 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 9,48 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 12 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 10,32 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 15 % per tahun 	
Pelaksana	KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenATR/BPN, KemenESDM, Kemenristek/BRIN, KemenLHK, LIPI, BPPT, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Rehabilitasi saluran tambak (KemenPUPR, KemenKP, Pemda) Peningkatan inovasi, adopsi dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas (KemenKP, Kemenristek/BRIN, LIPI, BPPT, Swasta) Pengembangan Infrastruktur pendukung: jalan, listrik, air, pasar, IPAL, dan coldstorage (KemenKP, KemenESDM, Kemendag, KemenPUPR, BUMN PLN) Pengembangan Industri Perbenihan dan Induk Udang Nasional dan Kesehatan Ikan (KemenKP, Swasta) Pengelolaan dan Pendayagunaan Tata Ruang Pesisir dan harmonisasi Perizinan (KemenKP, KemenATR/BPN, KemenPUPR, KemenLHK, KemenESDM, Pemda) 					



7. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional



Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas perikanan tangkap masih rendah; Jaringan sistem pemasaran produk perikanan Internasional belum memiliki • Dukungan infrastruktur produksi belum optimal; Tata kelola Perikanan perlu ditingkatkan 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Indonesia sebagai produsen perikanan utama dunia, dengan fasilitas Internasional 2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024. 3. Meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 						
Durasi dan Lokasi	2020-2024 (5 tahun) : Lokasi Sulawesi Utara, Sumatera Utara/Riau, Maluku						
	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Indikasi Target dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan tangkap 8,02 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 6,1 miliar 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan tangkap 8,42 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 6,6 miliar 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan tangkap 8,88 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 7,0 miliar 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan tangkap 9,43 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 7,5 miliar 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan tangkap 10,10 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 8,0 miliar 	3 lokasi integrasi pelabuhan perikanan dan fish market	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 30 Triliun • APBN: 7,2 Triliun • KPBU dan Swasta: 22,8 Triliun
Pelaksana	KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenristek, KemenLHK, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Pelabuhan Perikanan berskala internasional dan restrukturisasi armada kapal perikanan (KemenKP, Kemenperin, Pemda, BUMN/swasta) 2. Pembangunan infrastruktur pendukung, pasar, cold storage dan sistem logistik (KemenPUPR, KemenESDM, BUMN/Swasta, KemenKP, Kemendag, Pemda) 3. Penguatan data stock perikanan dan harmonisasi perijinan (KemenKP, Kemenhub, Kemenristek, Pemda) 4. Penguatan lembaga pengelola WPP (KemenKP, Pemda) 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan <i>fishing ground</i> (KemenKP, KemenLHK, Pemda) 						



8. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan (1/2)

Latar Belakang	<p>1. Kawasan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau berada pada lokasi yang strategis terhadap <i>hub</i> di Singapura sehingga berpotensi menarik pasar global terutama di wilayah Asia. Namun, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam 5 tahun mengalami penurunan dari 6,60% (2014) menjadi 4,56% (2018). Share sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan dari 38,21% (2014) menjadi 36,86% (2018).</p> <p>2. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, padahal di tiga wilayah ini telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>3. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan yaitu: KEK Galang Batang (operasional), KPBPB Batam (belum optimal), rencana pengembangan KI Bintan Aerospace, KSPN Nongsa (belum optimal), KSPN Lagoi-Bintan (belum optimal dikembangkan oleh swasta).</p> <p>4. KI Bintan Aerospace akan dikembangkan seluruhnya oleh PT Bintan Aviation Investment (Salim Group) bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II dengan kluster Bintan <i>offshore marine center</i> dan <i>New Bintan Airport</i>. Untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri kedirgantaraan secara terpadu. KI Bintan Aerospace akan beroperasi pada tahun 2021.</p>				
Manfaat	<p>1. Meningkatkan LPE di Kabupaten/Kota Wilayah Batam – Bintan dengan rata-rata mencapai 5,83 persen yang akan berkontribusi terhadap LPE Kepulauan Riau yang mencapai rata-rata 6,2 persen dan Nasional 6,0 persen</p> <p>2. Meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) secara nasional</p> <p>3. Meningkatnya nilai kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor akomodasi makan minum Wilayah Batam - Bintan</p> <p>4. Meningkatnya angka serapan tenaga kerja di Wilayah Batam – Bintan yang akan berpotensi menurunkan angka pengangguran di Kepulauan Riau</p> <p>5. Meningkatnya nilai ekspor Wilayah Batam – Bintan yang akan berkontribusi terhadap nilai ekspor nasional</p>				
Durasi	2020 – 2024 (5 Tahun)				
Target	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Kepulauan Riau	<p>a. LPE 4,7%</p> <p>b. LP Sektor Industri 5,4%</p> <p>c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%</p>	<p>a. LPE 5,8%</p> <p>b. LP Sektor Industri 5,3%</p> <p>c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,8%</p>	<p>a. LPE 6,4%</p> <p>b. LP Sektor Industri 5,5%</p> <p>c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%</p>	<p>a. LPE 6,8%</p> <p>b. LP Sektor Industri 5,6%</p> <p>c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%</p>	<p>a. LPE 7,2%</p> <p>b. LP Sektor Industri 5,7%</p> <p>c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 13%</p>
Kota Tanjung Pinang	a. LPE 4,26%	a. LPE 4,25%	a. LPE 4,40%	a. LPE 4,52%	a. LPE 4,63%
Kota Batam	<p>a. LPE 5,07%</p> <p>b. LPE Sektor Industri 4,5%</p> <p>c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,0%</p>	<p>a. LPE 5,07%</p> <p>b. LPE Sektor Industri 5,0%</p> <p>c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,3%</p>	<p>a. LPE 5,36%</p> <p>b. LPE Sektor Industri 6,0%</p> <p>c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,7%</p>	<p>a. LPE 5,58%</p> <p>b. LPE Sektor Industri 6,0%</p> <p>c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,7%</p>	<p>a. LPE 5,80%</p> <p>b. LPE Sektor Industri 6,5%</p> <p>c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 7,0%</p>



8. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan (2/2)

Target	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bintan	a. LPE 6,66% b. LPE Sektor Industri 5,2% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,5%	a. LPE 6,66% b. LPE Sektor Industri 5,3% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,5%	a. LPE 6,81% b. LPE Sektor Industri 5,4% c. LPE Sektor Akomodasi akan Minum 9,6%	a. LPE 6,93% b. LPE Sektor Industri 5,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,6%	a. LPE 7,05% b. LPE Sektor Industri 5,6% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,7%
Indikasi Pendanaan	Rp 69,9 Triliun APBN: Rp 6,4 Triliun KPBU: Rp 9,5 Triliun Badan Usaha : Rp 54,0 Triliun				
Pelaksana	BP Batam, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT Bintan Aviation Investment, PT Pelindo II, PT. Bintan Alumina Indonesia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, PT. Bintan Resort Cakrawala				
Highlight Proyek	1. Pembangunan jembatan Batam-Bintan (Potensi) 2. Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP Batam – Bintan) 3. Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri 4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI 5. Pengembangan KI Bintan Aerospace 6. Pengembangan fasilitas Pelabuhan Batu Ampar 7. Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim 8. Pengembangan fasilitas pelabuhan penumpang domestik dan internasional 9. Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil 10. Pengembangan kawasan Bintan Resort 11. Pengembangan KEK Galang Batang		12. Penyediaan air baku untuk kawasan Bareleng 13. Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase 14. Pembangunan infrastruktur energi gas 15. Pembangunan infrastruktur energi listrik 16. Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3 17. Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional 18. Jalan Batam 19. Jalan Bintan 20. Pembangunan Fly Over Sp. Kabil 21. Akses KEK Galang Batang I 22. Pembangunan PLTG MPP (Mobile Power Plant) Tanjung Pinang		



9. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar



Latar Belakang	<p>PALEMBANG: Pertumbuhan ekonomi WM Palembang sebesar 5,76% dengan dominasi sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pengungkit di wilayah Sumatera.</p> <p>DENPASAR: Posisi WM Denpasar (Sarbagita) sebagai PKN yang memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang maju namun belum berfungsi optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya.</p> <p>BANJARMASIN: WM Banjarmasin (Banjarbakula) berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi share PDRB terhadap provinsi 44,13%, Pulau Kalimantan 6,26%, dan nasional 0,51%</p> <p>MAKASSAR: Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5% per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,9%.</p>						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya share PDRB Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional 2. Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan 						
Lokasi	Wilayah Metropolitan PALEMBANG, DENPASAR, BANJARMASIN, MAKASSAR						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional		
Pelaksana	Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; Bandara; Pelabuhan; Jalan (Kemenhub, Kementerian PUPR, KPBU, APBD) 2. Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR) 3. SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD) 4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik (Kemendagri) 5. Publikasi/Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (BPS) 						



10. Ibu Kota Negara (IKN) (1/2)

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none">• Terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan Luar Jawa.• Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI2. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah<ul style="list-style-type: none">• Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan Output Multiplier 2,3;• Peningkatan Kesempatan Kerja (<i>Employment Multiplier</i> 2,9);• Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Kenaikan <i>Price of capital</i> 0,23% dan Kenaikan <i>Price of Labour</i> 1,37%)3. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris4. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun5. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek
Lokasi	Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Durasi	2020-2024 (5 tahun)



10. Ibu Kota Negara (IKN) (2/2)

	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Indikasi Target dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan IKN Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana Perencanaan Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan (Tahap I) Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan Pembangunan akses dan infrastruktur dasar 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Istana Negara Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I) Pengadaan lahan (Tahap II) Penetapan PP RTRWN Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (Tahap I) Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III dan IV), listrik (Tahap III). 	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (5.600 Ha) berikut sarana prasarana pendukung selesai.	Rp 466,98 Triliun <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 91,29 Triliun KPBU: 252,46 Triliun Badan Usaha: 123,23 Triliun
Pelaksana	Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu) Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR) Penyusunan <i>Grand Design</i> Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemandangan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN) Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN) Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI) 						



11. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong (1/2)



Latar Belakang	<p>MAJA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Percontohan pengembangan <i>compact city</i>, sebagai opsi lokasi lahan termurah dan terdekat dengan Jakarta sebagai kota inti, dengan dukungan akses transportasi murah <i>commuter line</i>.• Telah disusun <i>Master Plan Development Plan</i> (2016), RDTR, DED dan Rencana Strategis Permukiman (2018), direncanakan untuk implementasi tahun 2018-2019 dengan tema perencanaan: <i>Compact City</i>.• Infrastruktur pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan (capaian akses air minum layak 27,62% dan sanitasi layak 50,84% di Tahun 2017 di Kab. Lebak) <p>TANJUNG SELOR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tahap pembangunan di Kabupaten Bulungan, Inpres 09/2018, arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk pembangunan ibu kota provinsi baru.• Kota Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan negara dan berdekatan dengan PKN Tarakan yang merupakan pusat kegiatan regional. Potensi kenaikan jumlah penduduk sebesar 8% dari eksisting 2019 hingga tahun 2024 (Kab. Bulungan).• Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 74% dan sanitasi 67,57% di Tahun 2017 (Kab. Bulungan) <p>SOFIFI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan RDTR untuk PKW Sofifi, arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk pembangunan ibu kota provinsi• Posisi strategis dalam simpul transportasi nasional dengan adanya pelabuhan Ternate (dalam jaringan Tol Laut). Potensi kenaikan jumlah penduduk sekitar 6% dari eksisting 2019 hingga tahun 2024. (Kota Tidore Kepulauan)• Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 71% dan sanitasi 87,45% di tahun 2017 (Kota Tidore Kepulauan)• Daya dukung Kota Ternate yang telah melampaui batas. Sudah dibangun pusat pemerintahan di Sofifi, namun belum dimanfaatkan secara optimal <p>SORONG:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kota Sorong merupakan gerbang untuk Raja Ampat, penunjang dari Raja Ampat dan perbatasan dengan negara luar.• Delineasi Kota Baru Sorong terpacu pada penggerak ekonomi yang berada di sekitar KEK Sorong yang pusatnya adalah Distrik Aimas• BPIW sudah menyusun MPDP Sorong dengan fokus pembangunan awal pada KEK di sekitar kota Sorong• Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 64,04% dan sanitasi 77,32% di Tahun 2017
Manfaat	Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong)
Durasi	2020-2024 (5 tahun)



11. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong (2/2)

	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Indikasi Target dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none">Maja, Sorong, Sofifi: Penyusunan Renaksi Kota BaruTanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 20%	<ul style="list-style-type: none">Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 20%Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 40%	<ul style="list-style-type: none">Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 50%Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 60%	<ul style="list-style-type: none">Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 75%Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 80%	Pelaksanaan kegiatan dlm Renaksi Kota Baru 100%	Pelaksanaan kegiatan dlm Renaksi Kota Baru 100%	Rp. 134,6 Triliun (APBN, Badan Usaha, dan Swasta)
Pelaksana	Kemenhub, Kementerian PUPR, BUMN, Swasta						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none">Pembangunan Pelabuhan, Bendungan, Bandara (Kemenhub, BUMN, Swasta)Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR)SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Permukiman, TPA, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, APBD, Masyarakat, Swasta, KPBU)Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan (Kemenhub)						



12. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan wilayah adat di kawasan pegunungan dengan tingkat kesulitan akses dan keterisolasian yang tinggi serta harus dikembangkan sesuai amanat Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Kabupaten di Kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal sehingga paling membutuhkan keberpihakan pembangunan Memiliki potensi pertanian berupa: Ternak Sapi, Kopi, Kacang Tanah dan tanaman Hortikultura. Potensi pertanian tersebut cukup besar dan sesuai dengan potensi agroklimat, kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat. 					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di wilayah Adat Laa Pago dan 11 kabupaten di wilayah Adat Domberay Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan 					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 47,5 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 62,6	1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 48,4 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 63,3	1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 49,4 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 63,9	1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 50,4 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 64,5	1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 51,4 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 65,2	Rp 27,4 Triliun (APBN)
Pelaksana	KemenPUPR, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemendag, Kemendes PDTT, Pemda Provinsi Papua dan Pemda Provinsi Papua Barat					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (Kemenkes) Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (Kemenristekdikti) Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat (Komoditas Kakao dan Kopi) (Kementan) Pembangunan Jalan Trans Papua (KemenPUPR) Sarana prasarana air bersih (Kemendes PDTT) Penyediaan Energi Listrik (Kemen ESDM) 					



13. Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)



Latar Belakang	1. Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki akun kegiatan pasca bencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan per sektornya 2. Masih minimnya manajemen penanganan pasca bencana lintas sektor pembangunan					
Manfaat	1. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 2. Mempercepat pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana.					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 50%	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 75%	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 90%	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 100%	-	Rp 15,2 Triliun <ul style="list-style-type: none">• APBN: Rp 14,8 T• APBD: Rp 0,4 T
Pelaksana	BNPB, Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemendikbud, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemensos, Pemerintah Daerah					
Highlight Proyek	1. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang social ekonomi (BNPB) 2. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca bencana (Kementerian KUKM) 3. Rekonstruksi Jembatan Palu 4 (Kementerian PUPR) 4. Pembangunan Ruang SD dan Kelas Baru (Kementerian Dikbud) 5. Pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Pemerintah Provinsi)					



14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke (1/2)



Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan salah satu kawasan yang harus dikembangkan sesuai dengan arahan presiden untuk mengembangkan kawasan sekitar PLBN yang tercantum dalam Inpres No. 6 Tahun 2015 dan Inpres No. 1 Tahun 2019 PKSN ditetapkan sebagai Pusat pelayanan utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Memiliki potensi destinasi wisata dengan didukung oleh adanya infrastruktur transportasi, dan Potensi pengembangan pertanian dan pariwisata 					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,40 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,47 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,43	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,41 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,49 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,45	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,44 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,52 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,47	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,46 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,54 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,50	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,48 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,57 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,52	Rp 3,36 Triliun • APBN Rp 3,0 T • KPBU Rp 0,4 T



14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke (2/2)



	INDIKASI TARGET				INDIKASI PENDANAAN
	2021	2022	2023	2024	
Indikasi Target dan Pendanaan	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,37 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,38 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,49	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,38 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,39 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,51	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,40 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,41 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,53	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,42 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,43 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,56	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,44 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,45 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,59
Pelaksana	KemenPUPR, Kemenhub, KemenKP				
Highlight Proyek	1. Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan (KemenPUPR) 2. Pembangunan Terminal Barang dan Penumpang PLBN (Kemenhub) 3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dikembangkan (KemenKP) 4. Pengembangan Pelabuhan dan Bandar Udara (Kemenhub) 5. Penyediaan Moda Kapal Ternak (Kemenhub)				



15. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting



Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yakni sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (2015) • 27,7% balita di Indonesia stunting (tahun 2019) 						
Manfaat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup 2. Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> pada balita hingga 14 persen 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> • AKI menurun hingga 230/100.000 KH • Prevalensi stunting balita menurun hingga 24,1% (prioritas di 260 kab/kota) 	<ul style="list-style-type: none"> • AKI menurun hingga 217/100.000 KH • Prevalensi stunting balita 21,1% (prioritas di 360 kab/kota) 	<ul style="list-style-type: none"> • AKI menurun hingga 205/100.000 KH • Prevalensi stunting balita 18,4% (prioritas di 460 kab/kota) 	<ul style="list-style-type: none"> • AKI menurun hingga 194/100.000 KH • Prevalensi stunting balita 16,0% (prioritas di 514 kab/kota) 	<ul style="list-style-type: none"> • AKI menurun hingga 183/100.000 KH • Prevalensi stunting balita 14,0% (prioritas di 514 kab/kota) 	<ul style="list-style-type: none"> • AKI 183/100.000 KH • Prevalensi stunting balita turun menjadi 14,0% 	Rp 187,1 Triliun (APBN)
Pelaksana	Kemenkes, BKKBN, Kemendikbud, KKP, KemenPUPR, BPOM, KemenPPPA, Kemendagri, Kemenkominfo, Pemda.						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, serta STBM (Kemenkes), pelayanan KB berkualitas di fasilitas kesehatan (BKKBN) 2. PAUD Holistik-Integratif & kelas pengasuhan (Kemendikbud) 3. Penyediaan akses air minum & penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (Kemen PUPR) 4. Bantuan operasional kesehatan (DAK Kesehatan) 						



16. Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)



Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Skor <i>Global Innovation Index</i> (GII) tahun 2018 adalah 29,8 (peringkat 85 dari 126 negara). • Pembangunan <i>Science-Techno Park</i> (STP) tersebar di berbagai daerah namun tidak didukung dengan <i>source of knowledge</i> yang kuat • Hasil-hasil riset inovasi belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi produk komersial • Perlu optimalisasi STP di major universitas (UI, ITB, IPB, dan UGM) yang memiliki potensi sumber inovasi dan kandidat tenant (peneliti dan mahasiswa) yang besar untuk komersialisasi produk riset dan inovasi 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi 2. Peningkatan kapasitas STP sebagai simpul triple-helix dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial 3. Peningkatan produk inovasi nasional 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Lokasi	2 Provinsi (Jawa Barat: ITB, UI, IPB; dan DIY: UGM)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (25%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (25 %) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (50%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (50 %) • Pemenuhan alat instalasi STP (35%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (75%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (75%) • Pemenuhan alat instalasi STP (65%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (100%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri <i>in wall</i> STP (100%) • Pemenuhan alat instalasi STP (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan STP ITB, IPB, UI, dan UGM (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Beroperasinya 4 STP secara penuh dan menghasilkan startup (PPBT) • Produk riset yang dikomersialkan oleh industri <ul style="list-style-type: none"> - ITB : 10 Produk - UI: 19 Produk - IPB: 6 Produk - UGM: 22 Produk 	
Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ristek/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri (ITB, IPB, UI dan UGM), Kementerian Perindustrian, Swasta 						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengembangan Science Techno Park di ITB 2. Pembangunan dan Pengembangan Science Techno Park di IPB 3. Pembangunan dan Pengembangan Science Techno Park di UI 4. Pembangunan dan Pengembangan Science Techno Park di UGM 						



17. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0



Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah. • Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik. • Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 						
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,92% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 42,41% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1% 	Rp 29,1 Triliun (APBN)
Pelaksana	Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS, dan Swasta						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel (Survey ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisa pasar kerja). 2. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0 Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, <i>upgrading</i> dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan <i>softskills</i>, karakter kerja dan bahasa asing 3. Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT Vokasi non-politeknik 4. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/Skill Development Fund Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan. 5. Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (<i>skilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), dan sertifikasi. 						



18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (1/2)



Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam 2. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima 3. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program 					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) • Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan • Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industry 4.0 					
Durasi	2020-2024 (5 Tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	Rp. 406,5 Triliun (APBN)



18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (2/2)

	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikasi Target dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 30 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 50 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 70 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 90 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 100 persen 	
Peran Swasta	1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) Penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan					
Pelaksana	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemsos, Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementan, KKP, BPS, BPN, BNPB, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/BUMN, Pemerintah Daerah					
Highlight Proyek	a) Penyediaan layanan infrastruktur dan layanan internet b) Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan c) Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi d) Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako e) Penyaluran LPG 3 Kg dan listrik tepat sasaran					



19. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Jalan arteri primer P. Sumatera (Lintas Barat, Lintas Timur, dan Lintas Tengah) kondisinya belum mantap seluruhnya, memiliki <i>traffic</i> cukup tinggi, dan terjadi kemacetan pada beberapa titik, dengan perkiraan waktu tempuh Aceh-Lampung 48 jam Jalan Tol Trans Sumatera memiliki total panjang 2.800 km, baru terbangun sepanjang 540 km (pada ruas Bakahuni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Palembang-Indralaya), memerlukan penyelesaian untuk mendorong pengembangan wilayah Sumatera. 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Menurunkan waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam Menjadi enabler bagi pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera Menghubungkan koridor Timur dan Barat Sumatera 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp 308,5 Triliun • APBN: 105,5 • KPBU: 203,0
	472 km	590 km	495 km	325 km	149 km	2.031 km	
Pelaksana	Kementerian PUPR dan Badan Usaha						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Koridor I Banda Aceh-Medan (Banda Aceh-Sigli; Sigli-Lhokseumawe; Lhokseumawe-Langsa; Langsa-Binjai; Binjai-Medan) Koridor II Medan-Pekanbaru (Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi; Tebing Tinggi-Kisaran; Kisaran-Rantau Prapat; Rantau Prapat-Sp. Sigambali-Dumai; Dumai-Kandis-Pekanbaru) Koridor III Pekanbaru-Palembang (Pekanbaru-Rengat; Rengat-Jambi; Jambi-Tempino-Betung; Betung-Palembang-Kayu Agung) Koridor IV Palembang-Bakauheni (Kayu Agung-Pematang Panggang; Pematang Panggang-terbanggi besar; Terbanggi Besar-Bakauheni) Koridor V Tebing Tinggi-Sibolga (Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga) Koridor VI Pekanbaru-Padang (Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi; Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang) Koridor VII Palembang-Bengkulu (Palembang-Indralaya; Indralaya-Muara Enim; Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu) 						



20. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta - Bandung)



Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya urbanisasi di kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung) belum diimbangi dengan ketersediaan konektivitas KA berkecepatan tinggi untuk melayani mobilitas penumpang pada koridor antarkota metropolitan (konurbasi) Koridor Jakarta-Bandung dan Jakarta-Semarang diperkirakan akan jenuh memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan jarak 158 km ditempuh dengan kendaraan umum 4 – 5 jam dan menggunakan kereta api regular 3 – 4 jam Frekuensi penerbangan Jakarta-Surabaya sangat padat (peringkat ke-9 di Dunia), mencapai 150 pergerakan pesawat terbang per hari dan diperkirakan ada 3,849 juta kursi dalam penerbangan per tahun 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong pertumbuhan koridor ekonomi dan kota-kota lain (Semarang, Cirebon, Bandung) Mendorong pertumbuhan TOD di sekitar stasiun Mengurangi waktu tempuh Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit dan pada Koridor Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3 jam 30 menit 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
KA cepat Jakarta – Surabaya Phase 1 (Jakarta – Semarang)	Persiapan	Persiapan	Persiapan	Konstruksi	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalur KA: 435 km Target konstruksi selesai akhir 2024 	<p style="text-align: center;">Rp 63,6 Triliun</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 21,6 Triliun KPBU: Rp 42,0 Triliun
KA cepat Jakarta - Bandung	Konstruksi	Konstruksi	Operasi	Operasi	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Target 142,3 km (selesai akhir 2021) 	
Pelaksana	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BPPT, dan Badan Usaha						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan dan pengadaan lahan Pembangunan infrastruktur (bangunan Rel dan Flyover/Underpass lintas Jakarta-Semarang 226 unit) Sistem persinyalan dan kelistrikan Pembangunan Depo dan Stasiun Pembangunan 13 terowongan pada Lintas Jakarta-Bandung 						



21. Kereta Api Makassar-Pare Pare

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Jalan nasional koridor Makassar – Pare-pare merupakan jalur utama angkutan batubara dari Kalimantan melalui pelabuhan Pare-pare menuju kawasan industri di Makassar sebagai pusat industri di Pulau Sulawesi dengan proyeksi permintaan angkutan barang umum/industri sebesar 6.33% per tahun Jalan arteri lintas barat Sulawesi koridor Makassar – Barru – Pare-pare memiliki kapasitas yang kurang memadai untuk mendukung logistik sehingga terjadi beban muatan lebih 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Terhubungkannya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar <i>New Port</i> melalui Jalur Kereta Api Mengurangi beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi sebesar 20-30% pada tahun 2045 dengan target 1,5 juta ton per tahun Dalam jangka panjang Jaringan KA Makassar-Pare-Pare bagian dari jaringan KA Kawasan Metropolitan Makassar 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Segmen B, C dan D Konstruksi Segmen F 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Segmen A dan E 	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Segmen A dan E 	Konstruksi segmen A dan E	Konstruksi Segmen A dan E	<i>Full Operasional</i> pada tahun 2024	<p style="text-align: center;">Rp 6,4 Triliun</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 3,8 Triliun KPBU: Rp 2,6 Triliun
Pelaksana	Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan <i>readiness criteria</i> dan lahan Pembangunan badan jalan/track segmen BCDE (termasuk siding Pelabuhan Garongkong) Pembangunan stasiun barang, penumpang segmen BCDF Pembangunan Siding <i>track</i> Segmen F Pengadaan <i>Rolling Stock</i> dan Sistem persinyalan dan kelistrikan Pembangunan Depo, Stasiun, dan Balai Yasa 				<p>Target 142 km, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Segmen A: Pare-Pare - Palanro Segmen B: Palanro - Barru Segmen C: Barru - Pangkep Segmen D: Pangkep - Mandai Segmen E: Mandai - Makassar Segmen F : Pangkep - Pabrik Tonasa, dan Mandai - Pabrik Bosowa 		



22. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong)

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none">• Biaya Logistik Indonesia tertinggi dibandingkan sejumlah negara, termasuk India, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam• 28 pelabuhan utama dalam rencana induk pelabuhan belum terkonsolidasi• 77% Rute pelayaran di Indonesia didominasi <i>port to port</i>, sedangkan rute <i>loop</i> hanya 23%• Belum adanya standarisasi pelabuhan utama (panjang dermaga, kedalaman dan area penumpukan), untuk dijadikan pelabuhan utama transshipment domestik.					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan adanya standarisasi pelabuhan utama (nilai <i>turn round time</i> maksimum 24 jam)• Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk <i>loop</i> secara teratur menjadi 27%• Sebagai penunjang Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan					
Durasi	• Tahun 2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	INDIKASI PENDANAAN
	1 pelabuhan utama	2 pelabuhan utama	4 pelabuhan utama	6 pelabuhan utama	7 pelabuhan utama	Rp 113 Triliun (BUMN/Swasta)
Pelaksana	Kementerian Perhubungan, BUMN, Swasta					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none">1. Standardisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama (pengembangan dermaga dan terminal peti kemas)2. Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, dan pembangunan <i>breakwater</i>3. Pengadaan kapal besar kapasitas 3000-5000 TEUs4. Pengembangan Kawasan Industri					



23. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar



Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Urbanisasi berkembang pesat, diperkirakan pada 2045, 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dimana 6 metropolitan menyumbang sebesar 41% PDB nasional (setara Rp 5.554 triliun) • Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain masih di bawah 20% • Emisi yang masih tinggi dan dampak biaya kesehatan akibat emisi sektor transportasi mencapai 4,2 miliar dolar/tahun • Jakarta kota termacet ke-7 di dunia, dengan kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun 						
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitas • Mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sampai dengan 1 million t CO₂-eq • Meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan 						
Durasi	• 2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp 118,8 Triliun (APBN, APBD, Badan Usaha)
	3 Kota	4 kota	5 kota	6 kota	6 kota	6 Kota Metropolitan (Metropolitan Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar)	
Pelaksana	Kementerian Perhubungan, Pemda, dan Badan Usaha						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan studi, <i>readiness criteria</i>, dan lahan 2. Pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum massal perkotaan 3. Pengoperasian angkutan umum massal perkotaan oleh Badan Usaha 						



24. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (1/2)

Latar Belakang	1. Industri minyak bumi nasional sudah beroperasi lebih dari 100 tahun dan produksinya semakin menurun; 2. Belum ada penambahan kapasitas kilang dalam 10 tahun terakhir; 3. Meningkatnya kebutuhan BBM dan Produk Petrokimia.							
Manfaat	1. Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9Juta Barrel Per Hari di tahun 2026; 2. Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas.							
Durasi	2020-2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET	2020	2021	2022	2023	2024	Total	INDIKASI PENDANAAN
	Pembangunan kilang baru (grass root) Tuban	Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat <i>General Engineering Design, Site Development</i>	<i>Financing dan EPC</i>	<i>Financing dan EPC</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	+300 Ribuan BCPD (2026)	Rp 637,0 Triliun (Badan Usaha)
	Pembangunan kilang baru (grass root) Bontang	<i>Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development</i>	<i>AMDAL, BED-FEED</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	+300 Ribuan BCPD (2025)	
	Kilang RDMP Cilacap	<i>BEDP (Basic Engineering Design Package)/FEED (Front and Engineering Design, Site Development)</i>	<i>Early Works</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	+ 50 Ribuan BCPD (2026)	
	Kilang RDMP Balongan Phase I	<i>Proses Dual FEED sd Contract Award EPC, Site Development</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement and Construction) Works</i>	<i>Commissioning & Start Up, Operational Acceptance</i> 25 ribu BCPD			+100 Ribuan BCPD (2025)	
	Kilang RDMP Balongan Phase II	<i>BEDP (Basic Engineering Design Package), site development</i>	<i>BEDP (Basic Engineering Design Package), Dual FEED sd Contract Award EPC</i>	<i>EPC Works stage II</i>	<i>EPC Works stage II</i>	<i>EPC Works stage II</i>		



24. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2/2)

	INDIKASI TARGET	2020	2021	2022	2023	2024	Total	INDIKASI PENDANAAN
Indikasi Target dan Pendanaan	Kilang RDMP Balikpapan Phase I	<i>RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracker) FEED Tank Completed</i>	<i>OA (Operational Acceptance) Sub Sea Pipe Plan Lawe-Lawe RFSU (Ready For Start Up)</i>	<i>OA EPC Lawe-Lawe dan RFSU Boiler</i>	<i>Commissioning & Start Up, Operational Acceptance 100 Ribu BCPD</i>		+100 Ribu BCPD (2025)	Rp 637,0 Triliun (Badan Usaha)
	Kilang RDMP Balikpapan Phase II	<i>BEDP (Basic Engineering Design Package)</i>	<i>Dual FEED Process</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	EPC		
	Kilang RDMP Dumai	<i>BFS (Bankable Feasibility Study)</i>	<i>BEDP (Basic Engineering Design)</i>	<i>Dual Feed Process</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	+100 Ribu BCPD (2026)	
Pelaksana	1. Pertamina, Badan Usaha, KESDM, KEMENKEU, BUMN							
Highlight Proyek	1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan migas (KESDM); 2. Penyediaan dukungan fasilitas fiskal (Kemenkeu); 3. Pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi (BUMN).							



25. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA



Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkauan pelayanan listrik saat ini mencapai (rasio elektrifikasi) 98,86 %; 2. Ketimpangan kuantitas dan kualitas penyediaan listrik antara pulau jawa dengan luar Jawa; 3. Pasokan tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil. 							
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW; 2. Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%; 3. Meningkatkan konsumsi listrik menjadi 1.400 (kWh per kapita) di 2024; 4. Penurunan Emisi CO₂ Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO₂ pada 2024; 5. Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024; 6. Memenuhi kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional (5 Kawasan Pariwisata, 9 Kawasan Industri, 4 Kota Metropolitan, 4 Kota Baru, dan IKN Baru). 							
Durasi	2020-2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET							INDIKASI PENDANAAN
	Target	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp 1.121 Triliun (APBN dan Badan Usaha)
	Tambahan Kapasitas Pembangkit (MW)	5.452,5	6.446,1	3.442,8	6.209,2	5.727,7	27.277 MW	
	Kapasitas Jaringan Transmisi (kms)	4.459,6	4.765,9	4.632,1	3.519,5	1.692,0	19.069,10 kms	
Kapasitas Gardu Induk (MVA)	14.247,0	8.460,0	7.510,0	3.900,0	4.490,0	38.607 MVA		
Pelaksana	KESDM, BUMN dan Badan Usaha							
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>mini grid off grid</i> di daerah terisolir terutama pulau-pulau kecil Indonesia Timur (KESDM); 2. Pemanfaatan dan Pembangunan Bendungan Multifungsi (KPUPR); 3. Pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk (BUMN, IPP). 							



26. Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Transformasi Digital



Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 7.971 desa <i>blankspot</i> (tidak terlayani akses telekomunikasi dan internet); 2. Investasi pembangunan jaringan dengan teknologi serat optik untuk melayani daerah rural dan yang sulit terjangkau sangat mahal; 3. Belum terintegrasinya data pemerintahan yang memiliki standar kehandalan dan keamanan yang ideal; 4. Pemanfaatan infrastruktur untuk digitalisasi layanan masih terbatas pada 5 sektor strategis rencana pita lebar (e-Pemerintahan, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Pengadaan, dan E-Logistik) serta <i>e-Commerce</i> sehingga digitalisasi belum dirasakan secara masif. 							
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi kesenjangan digital khususnya pada daerah-daerah yang masih belum terlayani akses infrastruktur TIK 2. Menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah desa/kecamatan/kantor/pos pertahanan & keamanan 3. Menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi, konten dan layanan pemerintah, dengan teknologi yang aman, terintegrasi, dan dapat diakses setiap saat, serta mampu untuk melakukan analisa Big Data dari berbagai sumber data yang tersedia. 							
Durasi	2020-2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET							INDIKASI PENDANAAN
	Target Kumulatif	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Pembangunan BTS/Lastmile (desa non komersial)	5.052	5.052	5.052	5.052	5.052	5,052-desa	
	Kapasitas satelit Satria (Gbps)	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	150	150	150 Gbps	
	Persentase kecamatan yang terjangkau serat optik(%)	36,42	37,15	42,85	50,00	60,60	60%	
	Penyelenggaraan Pusat data nasional	K/L:30% Pemprov/kab/ kot:30%	K/L:50% Pemprov/kab/ kot:50%	K/L:80% Pemprov/kab/ kot:80%	K/L:100% Pemprov/kab/ :100%	K/L:100% Pemprov/kab/ kot:100%	K/L:100% Pemprov/kab/ kot:100%	
Sistem infrastruktur penyiaran digital	44 lokasi satuan transmisi	50 lokasi satuan transmisi	60 lokasi satuan transmisi	74 lokasi satuan transmisi	55 lokasi satuan transmisi	283 lokasi satuan transmisi		
Pelaksana	Kemenkominfo, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kemendagri, KemenPAN, BSSN, BPPT, dan Badan Usaha							
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan jangkauan jaringan bergerak pitalebar (<i>BTS/Last Mile</i>) (Kemenkominfo, BUMN, Swasta) 2. Satelit Satria (Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenhan/Polri, Kemendagri) 3. Peningkatan jangkauan jaringan tetap pitalebar hingga ke tingkat kecamatan (Kemenkominfo, BUMN, Swasta) 4. Penyediaan Infrastruktur SPBE (Kemenkominfo, BSSN, BPPT) 5. Penyediaan infrastruktur penyiaran publik digital (Kemkominfo, LPP TVRI) 							



27. Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> Banjir rob masih terjadi beberapa kawasan perkotaan Pantai Utara Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, Gerbangkertosusila) Kualitas air di 10 wilayah sungai di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa tercemar sedang hingga berat Belum terhubungnya konektivitas JIPS Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Mengatasi bencana banjir rob di Jakarta Utara, Semarang, Pekalongan, Demak, Cirebon Meningkatkan kualitas air sungai tercemar menjadi kualitas kelas II Menurunkan waktu tempuh Semarang - Demak (dari 1 jam menjadi 25 menit) Meningkatkan konektivitas Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
• Terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah	• 16 unit	• 19 unit	• 36 unit	• 28 unit	• 5 unit	• 104 unit	Rp 54,9 Triliun APBN: Rp 31,4 Triliun KPBU: Rp 18,7 Triliun APBD: Rp 4,8 Triliun
• Terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai	• 12,8 Km	• 21,4 Km	• 21,8 Km	• 22,6 Km	• 22,5 Km	• 100,9 Km	
• Terbangunnya SPALDT permukiman dan perkotaan	• 66.611 KK	• 105.205 KK	• 105.205 KK	• 157.808 KK	• 157.808 KK	• 592.637 KK	
• Terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu/ONLIMO	• 47 unit	• 16 unit	• 14 unit	• 12 unit	• 11 unit	• 100 unit	
• Terbangunnya jalan Tol Semarang-Demak					• 27 Km	• 27 Km	
Pelaksana	KemenPUPR, KemenESDM, Pemda, & Badan Usaha						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Alat pemantauan penurunan tanah (KemenESDM) Tanggul Laut dan bangunan pengaman pantai (KemenPUPR) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (KemenPUPR) Jalan Tol Semarang-Demak (KemenPUPR) 						



28. 18 Waduk Multiguna

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> Berkurangnya total volume tampungan sebesar 19% akibat sedimentasi (Pulau Jawa hingga 31%) Sekitar 59% bendungan eksisting hanya memiliki fungsi tunggal, terutama untuk irigasi Rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi (tingkat kehandalan jaringan irigasi 70%) Semakin tingginya kompetisi air seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi, terutama di Pulau Jawa 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya tampungan air untuk mereduksi risiko bencana banjir sebesar 12.999,41 m³/detik Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,48 m³/detik Tersedianya pasokan listrik untuk mendukung KEK/KI dan industri yang bersumber dari waduk sebesar 2.437,55 MW Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan Peningkatan efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI (DI Jatiluhur, DI Kedungputri, DI Pamukkulu, DI Waduk Wadaslintang, DI Sadang, DI Mrican, DI Way Sekampung, DI Rentang, dan DI Komering) Peningkatan IP (Indeks Pertanaman) sebesar rata-rata 25% di 9 DI 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
• Jumlah waduk multiguna yang dibangun	• 0 unit	• 4 unit	• 3 unit	• 2 unit	• 9 unit	• 18 unit (10 APBN, 6 KPBU, 2 SWASTA/BUMN)	Rp 92,9 Triliun APBN: Rp 12,96 Triliun KPBU: Rp 20 Triliun Swasta: Rp 60 Triliun
• Alat ukur air (water accounting) yang terpasang	• 1 DI	• 2 DI	• 3 DI	• 2 DI	• 1 DI	• 9 DI	
Pelaksana	KemenPUPR dan Swasta						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan waduk multiguna Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (<i>water accounting</i>) 						



29. Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sistem jaringan jalan di Papua dan masih sangat tergantung dengan moda udara untuk distribusi barang dan mobilitas manusia mengakibatkan tingginya harga bahan pokok dan barang lainnya. Distribusi logistik di wilayah Pegunungan Tengah dilakukan melalui moda udara melalui bandara di Timika, Dekai, Wamena, Oksibil, dan Tanah Merah Kondisi bandara yang ada memerlukan peningkatan kapasitas dan dukungan subsidi perintis baik untuk penumpang maupun kargo 					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50 persen Mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui kepastian ketersediaan angkutan untuk hasil komoditas di daerah 					
Durasi	<ul style="list-style-type: none"> 2020-2024 (5 tahun) 					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	<ul style="list-style-type: none"> 9 bandara dikembangkan Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute 	<ul style="list-style-type: none"> 9 bandara dikembangkan Pengembangan Pelabuhan 2 Lokasi Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute 	<ul style="list-style-type: none"> 9 bandara dikembangkan Pengembangan Pelabuhan 2 Lokasi Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute 	<ul style="list-style-type: none"> 9 bandara dikembangkan Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute 	<ul style="list-style-type: none"> 7 bandara dikembangkan Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute 	Rp 7,7 Triliun (APBN)
Pelaksana	Kementerian Perhubungan					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan subsidi perintis angkutan penumpang, kargo, dan BBM Peningkatan kapasitas 11 bandara pendukung jembatan udara (Manokwari, Wamena, Dekai, Oksibil, Elelim, Ilaga, Timika, Tanah Merah, Yahukimo) Integrasi dengan Tol Laut melalui pengembangan pelabuhan Pomako dan Agat Penyediaan Subsidi Perintis Tol Laut pada 2 Rute 					



30. Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sistem jaringan jalan di pulau-pulau terluar/tertinggal • Pulau-pulau terluar/tertinggal sebagian besar belum didukung dengan sistem jaringan jalan yang memadai • Kemantapan jalan eksisting di pulau-pulau terluar/tertinggal masih rendah 				
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas • Meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah • Mendukung percepatan pembangunan di daerah 				
Durasi	2020-2024 (5 tahun)				
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET			INDIKASI PENDANAAN	
	2020-2024		Total Volume		
	Peningkatan/pembangunan jalan Lingkar/Trans Pulau: <ul style="list-style-type: none"> • Simelue • Nias • Mentawai • Enggano • Natuna • Sumba 	<ul style="list-style-type: none"> • Muna • Buton • Aru • Babar • Buru • Seram 	<ul style="list-style-type: none"> • Kei Besar • Selaru • Moa • Wetar • Morotai • Biak 	974,36 km	Rp 12,46 Triliun (APBN)
Pelaksana	Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah				
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan proyek dan lahan 2. Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 3. Pembangunan Jalan dan Jembatan 				



31. Jalan Trans Papua Merauke - Sorong

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Papua memiliki keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan koridor dari Merauke hingga Sorong, termasuk koridor penghubung ke pusat kegiatan ekonomi dan Kawasan permukiman di Kabupaten/Kota. Jalan Trans Papua dengan panjang total 3.416,02 km (2.345,40 km di Papua dan 1.070,62 km di Papua Barat), masih terdapat ruas jalan yang belum terhubung dan memerlukan penanganan agar dapat berfungsi dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. 							
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua Mengurangi biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 							
Durasi	2020-2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET							INDIKASI PENDANAAN
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	• Pembangunan Jalan	109,54 km	109,54 km	89,54 km	89,54 km	89,54 km	487,68 km	
• Pembangunan/Penggantian Jembatan	4.027 m	4.197 m	3.647 m	3.212 m	3.276 m	18.361 m		
Pelaksana	Kementerian PUPR							
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan Ruas Waghete - Timika; Oksibil - Seredala; Wamena - Habema - Mumugu; Wamena - Elelim - Jayapura; Enarotali - Ilaga - Mulia - Wamena; Fakfak (SP. Moyana) - Windesi; Sp.3 Moyana - Tiwara - Bofuer; Sp.3 Moyana - Wanoma; Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat) Pembangunan/penggantian jembatan ruas Enarotali - Ilaga - Mulia - Wamena; Wamena - Elelim - Jayapura (Yetti); Wamena - Habema - Mumugu; Kenyam - Dekai; Dekai - Oksibil; Waghete - Timika; Fakfak (SP. Moyana) - Windesi; Sp.3 Moyana - Wanoma; Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat) 							



32. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

Latar Belakang	Sampai dengan tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih mencapai 74,58% termasuk akses sanitasi aman hanya mencapai 7,42%. Selain itu, 9,36% rumah tangga masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Masih terdapat gap sebesar 7,58% untuk mencapai target akses sanitasi aman sebesar 15% pada tahun 2024. Penyediaan akses sanitasi sangat berkorelasi dengan penurunan angka stunting dan penurunan pencemaran air dari sumber air limbah domestik.						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman) 2. Menurunkan persentase rumah tangga yang BABS di tempat terbuka menjadi 0% 3. Menurunkan angka stunting akibat akses sanitasi buruk menjadi kurang dari 10% 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 303.028 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 24 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 77 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 101 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 152 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 151 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD-Terpusat Skala Kota: 311.760 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 1,4 juta SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 505 unit di 374 kab/kota 	<p>Rp 140,9 Triliun</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN: Rp 73,5 Triliun • APBD: Rp 1,7 Triliun • Masyarakat/Swasta: Rp 65,7 Triliun
Pelaksana	KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Swasta, Masyarakat						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (sistem offsite) skala regional, kota, dan permukiman (Kementerian PUPR, Pemda, DAK, Masyarakat) 2. Pembangunan SPALD-Setempat skala individu, pembangunan dan pengembangan IPLT didukung dengan sistem pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan DAK) 3. Fasilitasi penyusunan regulasi terkait pengelolaan sanitasi di pusat dan daerah (Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda) 4. Implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan penguatan layanan pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan Pemda) 5. Peningkatan perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (Kementerian Kesehatan) 						



33. Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian akses air minum layak pada tahun 2018 adalah 87,75%, yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaian sebesar 20,14% dan bukan jaringan perpipaian sebesar 67,61% 2. Defisit air baku 2018 mencapai 181,3 m³/detik 3. Baru 59,6% PDAM yang memiliki kinerja sehat (2018). 4. Kurangnya akses air minum yang layak dan aman merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air, seperti diare dan juga <i>stunting</i>. 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pembangunan akses air minum perpipaian untuk 10 juta rumah tangga. 2. Meningkatkan akses air minum layak nasional menjadi 100% yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaian 30,45% dan bukan jaringan perpipaian 69,55% 3. Menjamin ketersediaan air baku untuk air minum (50 m³/detik) 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses air minum layak dan aman yang dapat diakses pada saat dibutuhkan dan memenuhi standar kesehatan 5. Meningkatkan tingkat kesehatan, penyediaan akses air minum layak dan aman memiliki kontribusi sebesar 70% dalam penanganan <i>stunting</i> 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 4,27 m³/detik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 11,4 m³/detik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 11,4 m³/detik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 11,4 m³/detik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 11,4 m³/detik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 50 m³/detik 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): 1.000.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SPAM: 1.500.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SPAM: 2.000.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SPAM: 2.500.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SPAM: 3.000.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SPAM: 10.000.000 Sambungan Rumah di 34 Provinsi 		
Pelaksana	Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, Badan Usaha						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan air baku di kawasan prioritas pulau kecil terluar sebanyak 0,96 m³/s. 2. Menyediakan air baku di kawasan prioritas daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sebanyak 17,62 m³/s 3. Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan perkotaan sebanyak 9,8 m³/s. 4. Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) sebanyak 2,64 m³/s. 5. Menyediakan air baku di Kawasan pantai utara Jawa sebesar 2,45 m³/s. 6. Penyediaan air baku di kawasan rawan air sebanyak 16,54 m³/s. 7. Penurunan tingkat kebocoran hingga 25% (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah, PDAM) 8. Perluasan jaringan dan pemanfaatan kapasitas terpasang 2,89 juta SR (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah) 9. Peningkatan/pembangunan SPAM baru 40.400 L/dtk (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah) 10. Pembangunan SPAM regional 10.150 L/dtk (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah) 11. Peningkatan kinerja operator air minum, 100% sehat (Ditjen CK - Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah) 						



34. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga yang tinggal di hunian layak pada tahun 2018 sebesar 54,1% Belum optimalnya pemanfaatan lahan di perkotaan untuk kebutuhan hunian Masyarakat menengah ke bawah bertempat tinggal jauh dari pusat kegiatan Belum adanya sistem penyediaan perumahan di perkotaan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota) 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	145.978	160.853	194.260	223.560	275.439	<ul style="list-style-type: none"> 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik Lokasi Prioritas: 6 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Maminasata, Bandung Raya, Gerbangkertosusilo, Jabodetabek, Kedungsepur) 	Rp. 397,9 Triliun APBN: Rp 18 Triliun APBD: Rp 109,2 Triliun BUMN: Rp 28 Triliun SWASTA: Rp 237,5 Triliun Masyarakat: Rp 5 Triliun
Pelaksana	Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, & Masyarakat						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN (Kementerian PUPR) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR (KPBU) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik oleh Pengembang (Dunia Usaha) Peremajaan Kota (<i>Urban Renewal</i>) Pengembangan Kawasan Berbasis Transit (<i>Transit Oriented Development</i>) 						



35. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

Latar Belakang	1. Produksi gas bumi nasional cukup besar sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan dalam negeri 2. Jaringan gas kota terbangun saat ini masih cukup rendah (537.000 SR)							
Manfaat	1. Penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 M per tahun dan penghematan pengeluaran energi masyarakat sebesar Rp 386 M per tahun (setara 1 juta SR); 2. Mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahunnya, serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp 2,64 T per tahun. 3. Lokasi prioritas: DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan, Palembang							
Durasi	2020-2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET	2020	2021	2022	2023	2024	Total	INDIKASI PENDANAAN
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN) (Sambungan Rumah/SR)	266.070 SR	100.000 SR	-	-	-	366.070 SR	Rp 38,4 Triliun APBN: Rp 4,1 Triliun BUMN: Rp 6,9 Triliun KPBU: Rp 27,4 Triliun
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (KPBU) (Sambungan Rumah/SR)		50.000	839.555	800.000	800.000	2.489.555 SR	
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (BUMN) (Sambungan Rumah/SR)	50.000	583.930				633.930 SR	
Pelaksana	KESDM, dan Badan Usaha							
Highlight Proyek	1. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui APBN (KESDM) 2. Review dokumen FEED-DEDC pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (KESDM) 3. Penyediaan dukungan pemerintah (Kemenkeu) 4. Pembangunan Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga (BUMN)							



36. Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan di Indonesia dengan kondisi kritis seluas 24,3 juta hektar 2. Kualitas sungai pada DAS Kritis tercemar sedang-berat 3. Monitoring kualitas air di DAS Kritis masih sangat rendah dan bersifat konvensional 4. Frekuensi bencana banjir di DAS Kritis semakin meningkat 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pemantauan kualitas air yang terintegrasi 566 telemetri. 2. Peningkatan kualitas air menjadi kelas II. 3. Penurunan erosi di wilayah DAS Kritis dengan penghijauan lahan kritis sebesar 150.000 Ha. 4. Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
• Penghijauan lahan kritis	• 30.000 Ha	• 30.000 Ha	• 30.000 Ha	• 30.000 Ha	• 30.000 Ha	• 150.000 Ha	Rp 30,9 Triliun (APBN)
• Jumlah IPAL Industri yang dibangun	• 121 unit	• 121 unit	• 138 unit	• 138 unit	• 48 unit	• 566 unit	
• Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Permukiman	• 28.888 KK	• 96.121 KK	• 96.121 KK	• 144.181 KK	• 144.181 KK	• 509.492 KK	
• Infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	• 3 unit kolam retensi • 2 unit check dam	• 10 unit kolam retensi • 4 unit check dam	• 10 unit kolam retensi • 4 unit check dam	• 10 unit kolam retensi • 15 unit check dam	• 10 unit kolam retensi • 20 unit check dam	• 36 unit kolam retensi • 52 unit check dam	
• Panjang normalisasi sungai	• 23,66 km	• 25 km	• 25 km	• 25 km	• 25 km	• 122,66 km	
Pelaksana	KemenPUPR dan Pemerintah Daerah						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan Lahan Kritis (KemenLHK) 2. IPAL Industri (KemenLHK) 3. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Permukiman (KemenPUPR) 4. Infrastruktur pengendali banjir (KemenPUPR) 5. Normalisasi sungai (KemenPUPR) 						



37. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk menghubungkan antara sumber gas dengan pengguna baik untuk rumah tangga, transportasi, industri, serta kelistrikan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur; 2. Diperkirakan sumber daya gas bumi di region V Kalimantan akan mengalami surplus dari tahun 2018-2027. 	
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan); 2. Memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan; 3. Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara; 4. Mendorong pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna 	
Durasi	2020-2024 (5 tahun)	INDIKASI PENDANAAN
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET	
	Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (Bontang-Banjarmasin)	2.219 km
	Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (Banjarmasin-Palangkaraya)	
	Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (Palangkaraya-Pontianak)	
Ruas Pipa Transmisi Natuna-Kalbar (Natuna D Alpha-Pontianak)		
	Rp 36,4 Triliun (Badan Usaha & APBN)	
Pelaksana	KESDM, Badan Usaha, Skema Pembiayaan: Badan Usaha	
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi gas, penetapan, dan pengawasan jaringan pipa (KESDM); 2. Pembangunan pipa transmisi (Badan Usaha) 	



38. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan timbulan limbah B3 di Indonesia menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, namun ketersediaan fasilitas pengolahannya masih sangat terbatas sehingga biaya pengolahan menjadi tinggi, terutama dari segi komponen transportasi 2. Jumlah dan sebaran fasilitas pengolahan limbah B3 medis masih terbatas (kebutuhan minimal 34 unit atau 1 unit di setiap provinsi) sedangkan pengolahan limbah B3 secara terpadu belum tersedia (kebutuhan minimal 1 unit di tiap 4 pulau utama: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa) 						
Manfaat	Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 medis yang terolah hingga mencapai 26.880 ton/tahun						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 4.200 ton/tahun	Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 9.240 ton/tahun	Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 15.120 ton/tahun	Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 21.000 ton/tahun	Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 26.880 ton/tahun	Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 26.880 ton/tahun	Rp 4,6 Triliun APBN: Rp 0,6 Triliun KPBU : Rp 3,0 Triliun Swasta : Rp 1,0 Triliun
Pelaksana	Kemen LHK, Kemenkes, Badan Usaha						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Kalimantan (KPBU – koordinasi KLHK) 2. Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua/Sumapapua (KPBU – koordinasi KLHK) 3. Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Jawa Timur (Swasta – koordinasi KLHK) 4. Penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 terintegrasi yang berasal dari berbagai sumber fasilitas pelayanan kesehatan (KLHK) 						



39. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> Ancaman bencana semakin masif, kompleks, dan tidak dapat diprediksi seiring dengan perubahan lingkungan; terutama ancaman bencana hidrometeorologi-(akibat perubahan iklim dan cuaca), bencana geologi (akibat aktivitas tektonik dan vulkanik); serta bencana lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan (khususnya air dan udara). Kelengkapan peralatan serta akurasi dan kecepatan dari sistem peringatan dini yang tersedia belum cukup memadai untuk mengantisipasi tingginya frekuensi dan banyaknya jenis ancaman bencana di Indonesia, selain itu belum terbentuk sistem peringatan dini yang terintegrasi dan efisien. 						
Manfaat	Meningkatkan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit, sehingga dapat mengurangi kerusakan dan/atau kerugian akibat bencana.						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 5,0 menit 	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 4,5 menit 	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 4,0 menit 	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,5 menit 	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,0 menit 	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,0 menit 	Rp 13,0 Triliun (APBN)
Pelaksana	BMKG, BNPB, KLHK, BIG, Kemen ESDM, LAPAN, LIPI, BPPT						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Informasi gempabumi dan tsunami dengan pemasangan seismograf (BMKG) Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II (BMKG) Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (KLHK) Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi (Kemen ESDM) Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun (BIG) Sistem Peringatan Dini Bencana (BNPB) 						



40. Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus <i>malware /trojan-activity</i> sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019). Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019). BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia. Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber. Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait 						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Menurunnya insiden serangan siber; Meningkatnya kemampuan bersama <i>multistakeholder</i> keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber; 			<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan <i>multistakeholder</i> keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat; Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar <i>stakeholder</i> terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). 			
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan NSOC BSSN Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 800 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 15 KLD 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan NSOC BSSN Penguatan SOC Tahap I Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 25 KLD 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan NSOC BSSN Penguatan SOC Tahap II Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan NSOC BSSN Penguatan SOC Tahap III Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan NSOC BSSN Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD 	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas SDM Kamsiber 3600 orang Penguatan SOC di 5 KL 100% Pembentukan CSIRT 121 KLD 100% 	Rp 8,0 Triliun (APBN)
Pelaksana	Badan Siber dan Sandi Negara; Kepolisian Nasional R.I; Kementerian Pertahanan/TNI; Badan Intelijen Negara; Kejaksaan Agung.						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas SDM CSSA (BSSN, BIN, Kemhan/TNI, Polri, Kejaksaan) Perluasan cakupan NSOC (BSSN) Pembangunan SOC (BSSN, BIN, Kemhan/TNI, Polri, Kejaksaan) Pembentukan CSIRT Sektor Pemerintah (BSSN) 						



41. Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> Adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna; Masih adanya risiko perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> (IUUF), <i>trans-national crimes</i> serta lemahnya sistem pengelolaan pengamanan navigasi. 					
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>deterrent effect</i> dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna; Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, <i>trans-national crimes</i> dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi. 					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 40%	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 55%	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 70%	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 85%	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 100%	Rp 12,2 Triliun (APBN)
Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 40%	Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 47%	Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 60%	Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 80%	Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 100%		
Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Pertahanan/TNI Bakamla 					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Alutsista TNI AL Pembangunan Sarpras Pertahanan dan Dukungannya Sistem Peringatan Dini Kamla Pengadaan Alpalkamla Pembangunan Sarpras Kamla 					